



RENCANA STRATEGIS

Tahun 2025-2029

**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SLEMAN**



Telephone: (0274) 865625

Faksimile: (0274) 865625



Surel: dispورا.sleman.go.id



Laman: dispورا@slemankab.go.id



Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan diperlukan sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2025-2029.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sleman.
5. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

- (1) Renstra PD memuat strategi pembangunan Perangkat Daerah, arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III	: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV	: PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V	: PENUTUP
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 18 September 2025



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 51

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3.Maksud dan Tujuan	6
1.4.Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1.Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	11
2.1.2.1. Sumber Daya Manusia	11
2.1.2.2. Sumber Daya Sarana Prasarana	13
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	21
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan	21
2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	23
2.1.7. Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	23
2.2.Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	23
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.2.2. Isu Strategis.....	30
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
3.1. Tujuan dan Sasaran	40
3.2. Strategi Perangkat Daerah	43
3.3. Arah Kebijakan	45
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	49
4.1. Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan	49
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	84
BAB V PENUTUP	85
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kedudukan Renstra PD Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya	3
Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman	8

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Berdasarkan Status Kepegawaian	11
Tabel 2.2	Data Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	11
Tabel 2.3	Data Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Berdasarkan Jabatan	12
Tabel 2.4	Data Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Berdasarkan Golongan	12
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman	13
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024	15
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024	19
Tabel 2.8	Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran.....	21
Tabel 2.9	Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan	22
Tabel 2.10	Isu Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman	31
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	41
Tabel 3.2	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman	46
Tabel 4.1	Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029	50
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029	62
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Kegiatan Prioritas Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029	81
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029	84
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029	84

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KABUPATEN
SLEMAN NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
SLEMAN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD

Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional PD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Renstra PD disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra PD

Persiapan penyusunan Renstra PD meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD

Penyusunan rancangan awal Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD yaitu dimulai sejak Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. perumusan rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

3. Penyusunan Rancangan Renstra PD

Rancangan Renstra PD disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam Rancangan Renstra PD. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bappeda dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Berita Acara kesepakatan selanjutnya digunakan untuk penyempurnaan Rancangan Renstra PD.

5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD

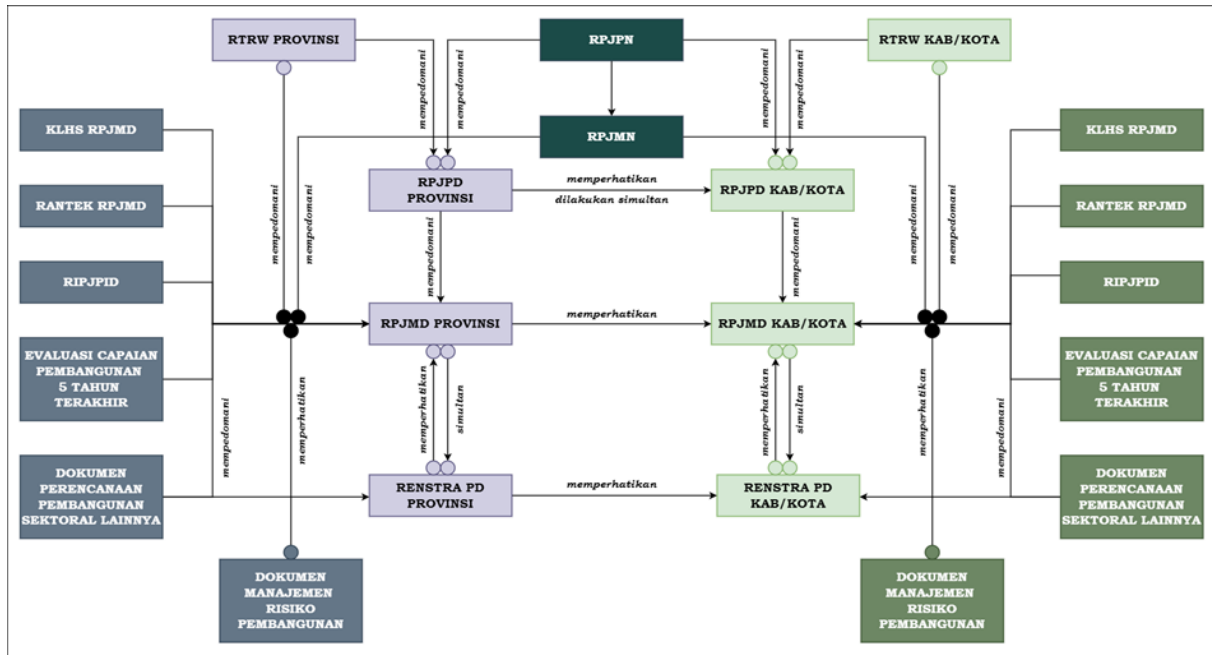
Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra PD menjadi Rancangan Akhir Renstra PD berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

6. Penetapan Renstra PD

Rancangan akhir Renstra PD disampaikan kepada Kepala BAPPEDA paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD

ditetapkan untuk diverifikasi. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Renstra PD merupakan bagian dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Gambaran tentang hubungan antara Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan Gambar 1.1 berikut ini.



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 1.1. Kedudukan Renstra PD Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan penyusunan Renstra PD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 dan 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 dan 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021/ Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
 20. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10);
 21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 13);
 22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 9);
 23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 78);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1 dan 157);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2 dan 158);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 13 dan 182)

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025 Nomor 5);
29. Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 6).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------|--|
| BAB I | <p>Pendahuluan</p> <p>Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.</p> |
| BAB II | <p>Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga</p> <p>Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur Dinas Pemuda dan Olahraga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian</p> |

kinerja atau capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga periode sebelumnya, serta menyajikan kelompok sasaran layanan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Selain itu, bagian ini mengemukakan permasalahan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga beserta faktor yang mempengaruhinya serta penentuan isu strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini, memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga, serta strategi dan arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2025-2029 yang dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD.

BAB IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bagian ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator dan target kinerja utama perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029.

BAB V Penutup

Pada bagian ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

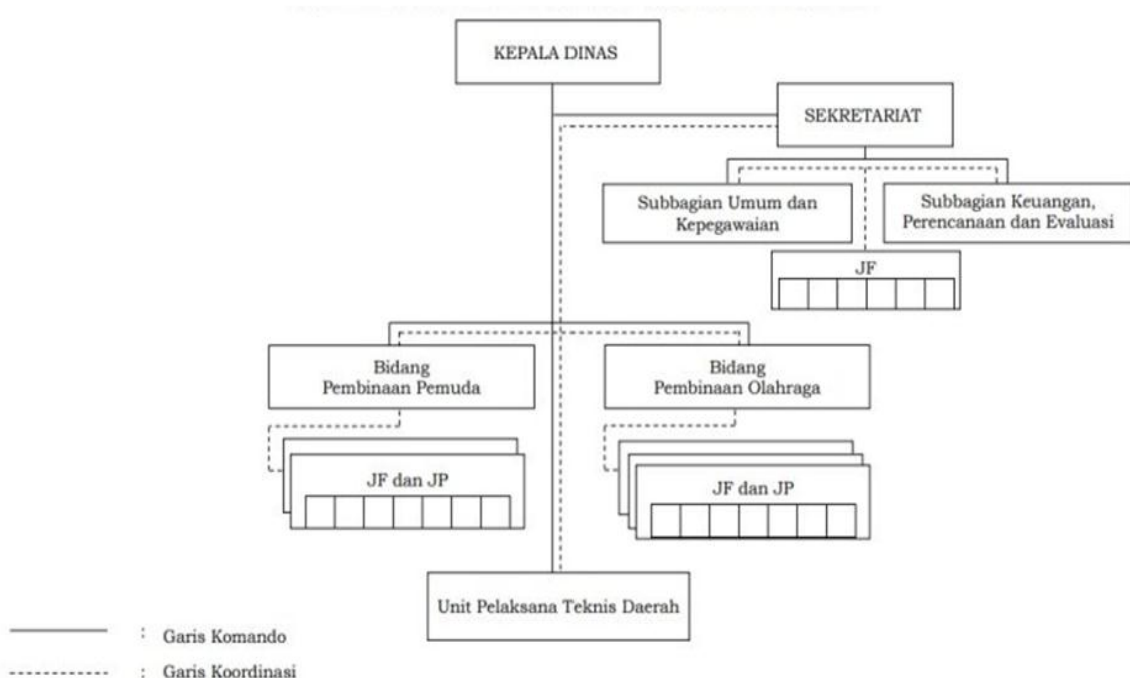
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagan susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman sebagaimana tersaji pada Gambar 2.1 berikut ini.



Sumber: Lampiran IX Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman

Berdasarkan Gambar 2.1 di atas, susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri atas:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
3. Bidang Pembinaan Pemuda;
4. Bidang Pembinaan Olahraga; dan
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
2. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga ;
3. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga ;
4. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga ;
5. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pemuda dan Olahraga;
2. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. pelaksanaan urusan umum;
4. pelaksanaan urusan kepegawaian;
5. pelaksanaan urusan keuangan;
6. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
7. pengoordinasian pelaksanaan tugas Unit Organisasi; dan
8. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian. Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
3. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
4. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
5. pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;

6. pengelolaan dan pelayanan dokumentasi, informasi, dan pengaduan;
7. pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan;
8. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
9. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
10. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
3. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
4. pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
5. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi;
6. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
7. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

Bidang Pembinaan Pemuda mempunyai tugas membina, memberdayakan, dan mengembangkan pemuda, kelembagaan dan kemitraan pemuda. Bidang Pembinaan Pemuda dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan Pemuda;
2. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda, kelembagaan dan kemitraan pemuda;
3. pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas pemuda;
4. pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kelembagaan dan kemitraan pemuda;
5. pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan;
6. pembinaan dan pengembangan kepramukaan; dan
7. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pembinaan Pemuda.

Bidang Pembinaan Olahraga mempunyai tugas membina dan mengembangkan olahraga, kelembagaan, dan sumber daya olahraga. Bidang Pembinaan Olahraga dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan Olahraga;
2. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan olahraga, kelembagaan, dan sumber daya olahraga;

3. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
4. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
5. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
6. pembinaan dan pengembangan kelembagaan olahraga;
7. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
8. pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga; dan
9. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pembinaan Olahraga.

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pemuda dan Olahraga.

2.1.2.Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, kemajuan organisasi sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mendukung organisasi. Data pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman per tanggal 1 Agustus 2025 sebagaimana dalam beberapa tabel berikut ini.

Tabel 2.1.

Data Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah (orang)			Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total	
1	PNS	14	11	25	
2	PPPK	3	1	4	
3	CPNS	0	2	2	
	Jumlah	17	14	31	

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman (1 Agustus 2025)

Tabel 2.2.

Data Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)			Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total	
1	S2	3	3	6	
2	S1	8	7	14	
3	D-III	1	2	3	
4	SLTA	5	2	6	
	Jumlah	17	14	31	

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman (1 Agustus 2025)

Tabel 2.3.
Data Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Berdasarkan Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah (orang)			Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total	
1	Kepala Dinas	1	-	1	Eselon II b
2	Sekretaris Dinas	-	1	1	Eselon III a
3	Kepala Bidang	1	1	2	Eselon III b
4	Kepala Subbag	-	2	2	Eselon IVa
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda	3	-	3	-
6	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1	1	2	-
7	Penelaah Teknis	3	6	9	-
8	Pengadministrasi	3	2	5	-
9	Pengelola Layanan	3	-	3	-
10	Pengelola Data dan Informasi	1	-	1	-
11	Arsiparis	1	-	1	-
12	Pranata Terampil	-	1	1	-
	Jumlah	17	14	31	

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman (1 Agustus 2025)

Tabel 2.4
Data Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Berdasarkan Golongan

No	Nama Golongan	Jumlah (orang)			Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total	
1	Pembina Utama Muda, IV/c	1	-	1	
2	Pembina Tingkat I, IV/b	-	1	1	
3	Pembina, IV/a	2	1	3	
4	Penata Tingkat I, III/d	4	1	5	
5	Penata Muda, III/a	4	3	7	
6	Penata, III/c	-	2	2	
7	Penata Muda Tingkat I, III/b	3	2	5	
8	Pengatur, II/c	1	2	3	
9	Golongan IX (PPPK)	1	-	1	
10	Golongan VII (PPPK)	1	-	1	
11	Golongan V (PPPK)	1	1	2	
	Jumlah	18	13	31	

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman (1 Agustus 2025)

2.1.2.2. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sarana prasarana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman keadaan per Semester I tahun 2025 tersebar di Sekretariat dan Bidang-bidang, seperti pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5.

Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman

No	Nama Barang	Jumlah (unit)	Keterangan
1	Kendaraan roda 4 perorangan	5	1. Toyota Rush 2. Suzuki Ertiga 3. New Avanza 4. Daihatsu Xenia 5. Mitsubishi Colt
2	Kendaraan roda 4 angkutan barang	1	Suzuki Pick Up Carry
3	Kendaraan roda 2	9	1. Suzuki Axelo 2. Honda Supra X 3. Honda Revo (5) 4. Honda Vario 5. Honda Vario 125
4	Kendaraan tak bermotor	2	1. Sepeda Polygon Xtrada 6 2. Sepeda Polygon Strattos s 2
5	Personal komputer	55	1. PC Unit (43) 2. Note Book (10) 3. Tablet PC (2)
6	Peralatan personal komputer		1. Printer (34) 2. Monitor (1) 3. Scanner (1) 4. Viewer (3) 5. Soundcard (2)
7	Peralatan jaringan	2	1. Hub (2)
8	Peralatan Mainframe	2	
9	Electric genset	1	
10	Alat pemeliharaan tanaman/Ikan/Ternak	3	
11	Alat penyimpanan perlengkapan kantor	71	
12	Meubelair	150	
13	Alat pendingin	12	
14	Alat komunikasi telepon	4	
15	Alat keamanan	10	
16	Alat pemadam kebakaran	4	
17	Alat kantor lainnya	30	
18	Alat rumah tangga lainnya (Home Use)	64	

No	Nama Barang	Jumlah (unit)	Keterangan
19	Peralatan studio audio	15	
20	Peralatan studio video dan film	4	
21	Alat musik	14	
22	Alat kedokteran umum	41	
23	Alat kesehatan umum lainnya	2	
24	Peralatan permainan	18	
25	Peralatan olahraga lainnya	127	
26	Alat pengukur waktu	2	
27	Alat dapur	2	
28	Humidity control	1	
29	Alat pembersih	3	
30	Meja kerja pejabat	12	
31	Kursi kerja pejabat	13	
32	Kursi rapat pejabat	5	
33	Kursi hadap depan meja kerja pejabat	10	
34	Bangunan Gedung Kantor	1	
35	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1	
36	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1	
37	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2	
38	Konstruksi dalam pengerjaan	2	
39	Software	2	
40	Kajian	1	
41	Aset Lain-lain	25	

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman (Semester I 2025)

2.1.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tahun 2020 s.d tahun 2024 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja baik dari indikator kinerja kunci maupun indikator kinerja lainnya seperti indikator kinerja utama dan indikator kinerja dalam RPJMD. Selain itu kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman dapat dilihat sejauh mana serapan anggarannya. Kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman selama tahun 2020 s.d tahun 2024 ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator dan serapan anggaran dibandingkan dengan sasaran/target renstra periode berjalan dapat dilihat dalam berikut ini.

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja (IKU dan IKK)	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti*	100%	100%				100%	100%				100%	100%			
2	Predikat AKIP	A	A	A	A (80)	A (82)	A	A (81,65)	A (82,95)	A (83,15)	A (83,40)	100%	100%	100%	100%	100%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,90	79	82	82	83	83,86	84,06	88,81	87,87	88,17	106,29%	106,41%	108,30%	107,16%	106,23%
4	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	90%	91%	93,50%	93,51%	98,52%	93,48%	95,85%	99,71%	98,37%	96,12%	103,9%	105,11%	106,64%	105,20%	97,56%
5	Persentase prestasi olahraga pelajar *	85%	85%				97%	60%				113,9%	70,59%			
6	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) **			0,36	0,37	0,42			0,34	0,42	0,386			94,44%	113,51%	91,47%
7	Persentase pembina yang bersertifikat kursus mahir dan atau kursus lainnya yang relevan dengan kepramukaan **			1,5%	1,6%	18%			11,23%	17,44%	21,90%			748,67%	1089,82%	121,67%

Sumber: LKjIP Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2021 hingga 2026

Keterangan: * berlaku untuk tahun 2020-2021

** berlaku untuk tahun 2022-2024

Tabel di atas menggambarkan tren capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman selama periode tahun 2020-2024. Kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman terbagi dalam 7 indikator. Indikator “Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti” digunakan dalam periode tahun 2020 dan 2021. Sedangkan indikator “Predikat AKIP” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat” berlaku selama 2020-2024. Ketiga indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah” dan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”. Selama dua tahun pelaksanaan, indikator “Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti” memiliki ketercapaian sempurna yaitu 100% terlaksana. Untuk indikator “Predikat AKIP” juga selalu mendapatkan nilai A sesuai target. Selanjutnya indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” selalu naik tiap tahun di atas 75 dan selalu melampaui target. Ketiga indikator tersebut dapat dikategorikan sangat berhasil karena memiliki rasio capaian ≥ 95 . Beberapa faktor turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian ketiga indikator tersebut, antara lain:

1. Tingginya komitmen pimpinan dan pelaksana teknis kegiatan dalam mendukung pencapaian predikat AKIP yang diwujudkan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Laporan Tahunan, dan dokumen lainnya. Tindak lanjut komitmen pimpinan dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi secara berkala melibatkan seluruh jajaran struktural;
2. Pendampingan terkait penyusunan laporan keuangan dan aset;
3. Pendampingan terhadap pengawasan internal pemerintah;
4. Pendampingan terhadap berbagai macam laporan baik bulanan, triwulanan maupun tahunan, baik manual maupun secara sistem;
5. Pendampingan terhadap perencanaan pembangunan daerah;
6. Upaya perbaikan berkesinambungan terhadap hasil evaluasi indeks kepuasan masyarakat tahun sebelumnya;
7. Upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat secara berkesinambungan melalui penerapan budaya pelayanan prima;
8. Pembinaan terkait pelayanan publik yang berkelanjutan;
9. Tingginya kesadaran pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik;
10. Adanya layanan pengaduan saran dan masukan.

Indikator keempat adalah “Persentase organisasi kepemudaan yang aktif” yang digunakan selama 2020-2024. Pengukuran indikator ini untuk menilai pencapaian sasaran “Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan” Indikator ini memiliki tren positif naik, hanya sedikit turun pada 2024 dan selalu di atas 90%. Rasio capaiannya setiap tahun ≥ 95 sehingga kategorinya sangat berhasil. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian tersebut antara lain:

1. Terjalinnnya koordinasi dan kolaborasi dengan dinas terkait dan praktisi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda.
2. Komitmen *stakeholder* terhadap pengembangan kepemimpinan pemuda melalui usulan Pagu Usulan Partisipasi Masyarakat (PUPM) dan Pokok-pokok Pikiran Dewan.

3. Adanya kerja sama antara OKP, pemuda umum dan pelajar dengan lembaga pemerintah, aktivis dan lembaga kemasyarakatan;
4. Adanya upaya peningkatan kualitas pembinaan pemuda melalui Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten serta Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten.

Pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat” diukur dengan 2 indikator yaitu “Persentase prestasi olahraga pelajar” dan “Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)”. Indikator “Persentase prestasi olahraga pelajar” hanya berlaku pada 2020 dan 2021, sedangkan tahun setelahnya yaitu 2022-2024 menggunakan “Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)”. Indikator “Persentase prestasi olahraga pelajar” terlihat fluktuatif yaitu tinggi di atas target pada 2020 dan turun drastis jauh di bawah target pada 2021. Indikator IPO juga fluktuatif sempat naik pada 2023 namun turun kembali pada 2024 dan belum mencapai target. Penurunan IPO pada tahun 2024 karena acuan performa pada salah satu dimensi pengukuran IPO berubah yang dari awal seluruh cabang olahraga menjadi hanya 14 cabang olahraga prioritas Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Jika menggunakan acuan yang sama seperti tahun sebelumnya, maka nilai IPO menjadi 0,404. Berdasarkan capaian tahun terakhir, maka indikator “Persentase prestasi olahraga pelajar” masuk dalam kategori cukup berhasil dengan capaian 70,59% (berada antara 50-80%), sedangkan indikator IPO berada pada kategori berhasil dengan capaian 91,47% (berada antara 80-95%). Faktor yang mempengaruhi capaian tersebut antara lain:

1. Adanya perbaikan yang konsisten dalam upaya meningkatkan literasi fisik di berbagai kapanewon.
2. Meningkatnya kesehatan masyarakat yang mencakup aspek fisik dan psikis yang memungkinkan seseorang menjalani kehidupan secara produktif.
3. Proses seleksi bagi atlet telah dilakukan sedini mungkin untuk menjaring atlet berbakat dari berbagai cabang olahraga sehingga dapat meningkatkan prestasi olahraga.

Indikator terakhir adalah Persentase pembina yang bersertifikat kursus mahir dan atau kursus lainnya yang relevan dengan kepramukaan. Indikator ini untuk menilai pencapaian sasaran “Meningkatnya kapasitas organisasi pramuka”. Indikator ini mulai digunakan sejak tahun 2022. Hasilnya pengukuran kinerja menunjukkan capaian indikator ini sangat jauh di atas target dan tertinggi dibandingkan indikator lainnya. Dua tahun pertama bahkan capaiannya mencapai di atas 1000%, namun pada 2024 dilakukan rasionalisasi target yang didasarkan pada capaian tahun sebelumnya, hasilnya pada tahun terakhir keberhasilannya mencapai 121,67%. Dengan demikian kategorinya adalah sangat berhasil. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan antara lain:

1. Tingginya minat/animo pembina pramuka untuk mengikuti kursus kepramukaan;

2. Ketersediaan dan efektifitas penggunaan anggaran penyelenggaraan kursus kepramukaan yaitu Kursus Mahir Dasar (KMD) dan Kursus Mahir Lanjutan (KML);
3. Adanya dukungan dari Kwartir Cabang (Kwarcab) Sleman dengan menyediakan Pelatih Pembina pramuka yang profesional;
4. Tingkat kelulusan peserta KMD dan KML sebesar 100%;
5. Terjalannya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan organisasi kepramukaan baik di Kwartir Cabang (Kwarcab) dan Kwartir Ranting (Kwarran).

Tabel 2.7.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Kepemudaan dan Olahraga	3.950.505.850	14.567.578.440	38.736.549.967	28.089.511.809	27.643.164.652	3.576.367.213	12.053.659.568	37.272.215.257	25.548.683.436	25.055.223.489	90,53	82,74	96,22	90,95	90,64	119,95%	120,12%

Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketercapaian tujuan dan sasaran. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

1. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.
2. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

Berdasarkan kriteria dan data di atas, dapat diketahui bahwa ada 3 sasaran yang capaian kinerjanya 100% atau lebih serta 1 sasaran yang kurang dari 100%. Sedangkan dari perbandingan antara capaian kinerja (Tabel 2.5) dan penyerapan anggaran (Tabel 2.6) didapatkan analisis perbandingan bahwa semua sasaran persentase penyerapan anggaran di bawah persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik” memiliki rata-rata persentase penyerapan anggaran 87,18% dan rata-rata capaian kinerja 102,29%
2. Sasaran “Meningkatnya kualitas bidang kepemudaan (partisipasi pemuda dalam pembangunan)” memiliki rata-rata persentase penyerapan anggaran 85,19% dan rata-rata capaian kinerja 103,68%
3. Sasaran “Meningkatnya kualitas bidang olahraga masyarakat” memiliki rata-rata persentase penyerapan anggaran 93,46% dan rata-rata capaian kinerja 96,03%
4. Sasaran “Meningkatnya kapasitas organisasi pramuka” memiliki rata-rata persentase penyerapan anggaran 99,77% dan rata-rata capaian kinerja 653,39%.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) sasaran dinyatakan efisien dengan rata-rata capaian kinerja di atas 100% yaitu “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik” sebesar 102,29%, “Meningkatnya kualitas bidang kepemudaan (partisipasi pemuda dalam pembangunan)” sebesar 103,68% dan “Meningkatnya kapasitas organisasi pramuka” sebesar 653,39%. Sedangkan sasaran “Meningkatnya kualitas bidang olahraga masyarakat” dapat dikategorikan belum efisien, karena rata-rata capaian kinerja di

bawah 100% yaitu 96,03%.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, ada beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.8.
Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

No	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1	Penyediaan informasi bidang kepemudaan dan olahraga berbasis teknologi informasi	Masyarakat umum
2	Legalisasi sertifikat atau piagam prestasi di bidang kepemudaan dan olahraga	Atlet, pelajar dan pemuda
3	Konsultasi di bidang kepemudaan dan olahraga	Masyarakat, pemerintah, swasta, OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda), lembaga cabang olahraga, komunitas/kelompok olahraga
4	Pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda, kelembagaan dan kemitraan pemuda	Pemuda, lembaga kepemudaan dan OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda)
5	Pembinaan dan pengembangan kepramukaan	Lembaga dan anggota Pramuka
6	Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, prestasi dan rekreasi serta kelembagaan olahraga	Atlet, sekolah, lembaga cabang olahraga, komunitas/kelompok olahraga masyarakat

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, bekerja sama dengan berbagai *stakeholders* sebagai berikut tabel di bawah ini.

Tabel 2.9.
Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Mitra Kerja	Bentuk Dukungan/Kerja sama
1	Penyediaan informasi bidang kepemudaan dan olahraga berbasis teknologi informasi	OPD (Dinas Kominfo)	Pengelolaan teknis domain <i>website</i> dan <i>bandwidth</i> internet di Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Legalisasi sertifikat atau piagam prestasi di bidang kepemudaan dan olahraga	OPD (Dinas Pendidikan), sekolah, organisasi kepemudaan dan organisasi olahraga	Memberikan informasi legalitas pemberi sertifikat
3	Konsultasi di bidang kepemudaan dan olahraga	Perguruan tinggi atau konsultan bidang kepemudaan dan olahraga	Sebagai Tenaga Ahli (TA) dalam penyediaan kajian sebagai bahan konsultasi
4	Pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda, kelembagaan dan kemitraan pemuda	Perguruan tinggi dan praktisi	Sebagai pemateri, instruktur atau pendamping
5	Pembinaan dan pengembangan kepramukaan	Kwarcab Pramuka	Sebagai pemateri, instruktur atau pendamping
6	Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, prestasi dan rekreasi serta kelembagaan olahraga	Perguruan tinggi dan organisasi olahraga seperti KONI, KORMI, NPC	Sebagai pemateri, instruktur atau pendamping, serta fasilitasi pembinaan dan pengembangan atlet dan tenaga keolahragaan.

No	Jenis Pelayanan	Mitra Kerja	Bentuk Dukungan/Kerja sama
7	Penyediaan data bidang kepemudaan dan olahraga	OPD (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	Dukungan data terkait

2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Tidak Ada

2.1.7. Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Tidak Ada

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan pembangunan daerah tidak terlepas dari keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan pada perangkat daerah. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman sebagai salah satu perangkat daerah yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, masih menghadapi beberapa permasalahan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman sebagai berikut:

1. Kapasitas dan kuantitas SDM Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman dalam tata kelola pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga masih kurang. Jumlah SDM hanya 39 orang untuk mengurus 258.000 penduduk usia 15-29 tahun (Kabupaten Sleman Dalam Angka Tahun 2024) atau 8.184 pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri dan 44.374 pemuda yang aktif dalam 676 organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, 2025). Adapun berdasarkan Analisis Jabatan Analisis Beban Kerja (Anjab ABK), Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman idealnya memiliki SDM sebanyak 55 orang, sehingga masih kekurangan 16 orang.

Secara kapasitas atau kualitas SDM juga masih terdapat *gap* kompetensi SDM yang ada. Penilaian kompetensi manajerial telah dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman pada tahun 2024 menggunakan 8 (delapan) indikator penilaian antara lain integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, serta pengambilan keputusan. Rincian hasil penilaian kompetensi setiap indikator terhadap 28 (dua puluh delapan) pegawai adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kompetensi	Perlu Peningkatan Kompetensi		Memenuhi Kompetensi	
		Orang	%	Orang	%
1	Integritas	14	50	14	50
2	Kerja sama	13	46	15	54
3	Komunikasi	12	43	16	57
4	Orientasi pada hasil	13	46	15	54
5	Pelayanan publik	15	54	13	46
6	Pengembangan diri dan orang lain	15	54	13	46
7	Mengelola perubahan	16	57	12	43
8	Pengambilan keputusan	17	61	11	39

Sumber: BKPP Kabupaten Sleman (2025)

Berdasarkan hasil penilaian di atas dapat diketahui terdapat 4 (empat) indikator yang persentasenya di atas 50% (lima puluh persen) untuk kategori memerlukan peningkatan kompetensi manajerial dan 4 (empat) Indikator yang nilai persentasenya di bawah 50% (lima puluh persen) untuk kategori tidak memerlukan peningkatan kompetensi manajerial. Dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga masih sangat perlu dalam peningkatan kompetensi pada indikator diantaranya adalah pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Selain itu, terdapat 3 (tiga) pegawai yang sangat perlu untuk peningkatan kompetensi manajerial dikarenakan dari 8 (delapan) indikator masih menunjukkan “PERLU”, akan tetapi 2 (dua) pegawai sudah memasuki purna tugas, sehingga tinggal 1 (satu) pegawai aktif yang memerlukan peningkatan kompetensi di semua indikator peningkatan kompetensi manajerial.

2. Kurang representatifnya gedung yang ditempati Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, baik dari aspek luasan maupun kondisi lingkungan. Gedung tersebut masih merupakan milik Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan menempati lantai dasar. Gedung eksisting memiliki luas

500,57 m² dari total luas Gedung Dinas Pendidikan seluas 3.212,27 m². Berikut adalah rincian penggunaan ruang eksisting dan perbandingannya dengan standar yang merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

No	Ruang Kerja	Standar Luas Ruangan (m ²)*	Luas Ruangan Eksisting (m ²)	Gap Luas (m ²)
1	Kepala Dinas Eselon IIB	58	29,7	-28,3
2	Sekretaris Dinas Eselon IIIA	24	11,88	- 12,12
3	Kepala Bidang Pemuda Eselon IIIB	21	11,88	-9,12
4	Kepala Bidang Olahraga Eselon IIIB	21	15,12	-5,88
5	Kepala Sub Bagian Umpeg Eselon IV	10	6,3	-3,7
6	Kepala Sub Bagian Umpeg Eselon IV	10	6,3	-3,7
7	Katimja PUPR setara eselon IV	10	6,3	-3,7
8	Katimja Ordik setara eselon IV	10	6,3	-3,7
9	Katimja Kelembagaan OR setara eselon IV	10	6,3	-3,7
10	Katimja Kelembagaan Pemuda setara eselon IV	10	6,3	-3,7
11	Katimja Pembinaan Pemuda setara eselon IV	10	6,3	-3,7
12	Staf KPE	2,2	2,7	0,5
13	Staf Umpeg	2,2	2,7	0,5
14	Staf timja PUPR	2,2	2,7	0,5
15	Staf timja Ordik	2,2	2,7	0,5
16	Staf timja Kelembagaan OR	2,2	2,7	0,5
17	Staf timja Kelembagaan Pemuda	2,2	2,7	0,5
18	Staf timja Pembinaan Pemuda	2,2	2,7	0,5

Keterangan: berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar ruang kerja belum sesuai standar, antara lain ruang Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kasubbag dan Ketua Tim Kerja (Katimja). Ruang kerja yang luasnya sudah sesuai standar hanyalah ruang kerja staf.

Kondisi lain adalah belum dimilikinya beberapa fasilitas yang

idealnya dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga seperti gudang penyimpanan alat/bahan percontohan olahraga, *hall*, ruang olahraga *indoor*, dan lainnya. Saat ini alat/bahan percontohan olahraga yang akan diberikan pada masyarakat disimpan di aula pertemuan baik internal maupun eksternal sehingga aula jadi kurang representatif dan kurang rapi.

Selanjutnya kondisi lingkungan juga menunjukkan kelembaban tinggi. Berikut adalah kondisi suhu dan kelembaban pada pengukuran terakhir saat tidak menggunakan AC.

No	Ruang	Waktu Pengukuran	Jam	Kondisi	Hasil Pengukuran		
					Suhu		Kelembaban
					In	Out	
1	Ruang Sekretaris Dinas	24 Juni 2025	14.20	Ber AC	26,5	24,7	64%
		25 Juni 2025	07.24	Tidak Ber AC	27,0	26,3	79%
2	Aula Gelora Pora	25 Juni 2025	12.00	Ber AC	26,3	25,3	59%
		25 Juni 2025	14.00	Tidak Ber AC	27,1	26	72%
3	Ruang Pemuda	30 Juni 2025	09.00	Ber AC	26,2	25,5	74%
		30 Juni 2025	07.40	Tidak Ber AC	27,2	26,2	78%
4	Ruang Olahraga	02 Juli 2025	15.15	Ber AC	28,5	27,5	71%
		02 Juli 2025	07.52	Tidak Ber AC	27,1	26,6	78%
5	Ruang Sekretariat	03 Juli 2025	10.12	Ber AC	28,1	27,5	71%
		03 Juli 2025	07.55	Tidak Ber AC	27,0	26,6	78%
6	Ruang Rapat Kepala Dinas	03 Juli 2025	15.39	Ber AC	25,7	25,5	73%
		03 Juli 2025	09.34	Tidak Ber AC	26,7	26,0	70%
7	Ruang Kepala Dinas	10 Juli 2025	15.00	Ber AC	25,6	25,5	73%
		10 Juli 2025	10.30	Tidak Ber AC	27,0	26,4	78%

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga (2025)

Standar untuk kesehatan lingkungan tingkat kelembaban yang baik di perkantoran menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran adalah 40-60%. Sedangkan suhu ruang kerja perkantoran memenuhi syarat kesehatan dan kenyamanan antara 23-26 derajat celsius. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa semua ruangan bila AC tidak dinyalakan maka suhu tidak sesuai standar. Beberapa ruangan masih belum sesuai standar walaupun AC telah dinyalakan seperti ruang kerja sekretariat dan ruang kerja bidang olahraga. Kelembaban ruang kerja juga menunjukkan belum memenuhi standar kecuali ruang kerja sekretaris dinas pada kondisi AC dinyalakan. Suhu ruangan dan kelembaban yang belum sesuai standar K3 dapat

meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti pemicu alergi dan infeksi, bernapas lebih berat, penyebaran virus, iritasi kulit, dehidrasi dan lain-lain.

3. Berkembangnya karakter generasi *strawberry* dan budaya instan yang melemahkan daya saing kepemudaan. Generasi *strawberry* merupakan julukan bagi Generasi Z, yaitu generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Julukan tersebut muncul karena mereka dianggap seperti buah stroberi yaitu terlihat cantik dan menarik dari luar, tetapi mudah "memar" atau rapuh ketika menghadapi tekanan (PAUD FIP UNESA, 2024). Generasi ini adalah generasi yang penuh dengan gagasan kreatif tetapi mudah menyerah dan gampang sakit hati dalam menghadapi tantangan yang muncul. Sedangkan budaya instan adalah salah satu pola pikir yang berkembang di masyarakat, yang menginginkan suatu hal dengan cara yang mudah, tanpa melalui suatu proses yang seharusnya. Kedua fenomena tersebut berpotensi mempengaruhi daya saing pemuda. Hal ini dapat dicerminkan dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Sleman pada tahun 2023 yang baru mencapai 66,67.
4. Tantangan permasalahan sosial di kalangan pemuda, seperti kejahatan jalanan atau *klithih*, kenakalan remaja, efek minuman keras dan narkoba, serta lainnya. Berdasarkan data Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman, jumlah kasus *klithih* pada 2024 sebanyak 25 kasus di Sleman. Sedangkan pada periode Januari-Juni 2025 terjadi sebanyak 9 kasus. Selanjutnya data temuan DP3AP2KB Kabupaten Sleman (2024) dari 50 sampel peserta didik di 6 sekolah setingkat SMP dan SMA yang tersebar di Kapanewon Berbah, Mlati, Moyudan, Tempel, dan Moyudan, menunjukkan adanya bermacam kenakalan remaja yang berhasil diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Jenis kenakalan remaja tersebut antara lain merokok, minum minuman beralkohol, kekerasan di jalan, balap liar, vandalisme, perundungan, sampai pornografi dan judi *online*.
5. Minimnya minat pemuda untuk aktif dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) serta kurangnya tenaga profesional dan komitmen dalam mendukung pengelolaan organisasi kepemudaan. Jumlah pemuda di Kabupaten Sleman 258.000 orang pada tahun 2024, sedangkan yang aktif dalam OKP pada tahun 2024 hanya 44.374 orang (17,20%). Adapun jumlah OKP di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 sebanyak 116 OKP, maka anggota yang aktif hanya sekitar 383 orang per OKP.

6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial dalam pelayanan bidang kepemudaan dan olahraga. Capaian masing-masing jenis *platform* per 13 Juni 2025 antara lain:

- Website dispورا.slemankab.go.id: Total *Visitors* 82.273 dan Total *Page Views* 3.098.
- Akun X @PoraSleman: *Followers* 549.
- Akun Instagram (IG) @disporaslemanofficial: *Followers* 5.739 dan 350 *post*.
- Youtube DISPORA KABUPATEN SLEMAN: 288 *subscribers* dan 24 *videos*.
- Facebook @Dispورا Kab. Sleman: *Followers* 2.600, posting terakhir tahun 2021.

Capaian di atas, menunjukkan performa yang cukup baik pada *website*. Sedangkan untuk media sosial menunjukkan interaksi masih minim serta *updating* atau *posting* status masih jarang dan belum konsisten. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman belum memiliki akun TikTok, padahal berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) (2024), TikTok termasuk dalam 3 besar media sosial favorit bagi *Gen Z* dan *Milenial*.

7. Belum optimalnya pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan ditandai dengan masih banyaknya pemuda yang belum mendapatkan layanan akses terhadap pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan serta dukungan kemandirian atau kewirausahaan. Jumlah pemuda di Kabupaten Sleman adalah 258.000 orang pada tahun 2024 (BPS Kabupaten Sleman, 2025), sedangkan yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri pada tahun 2024 baru 8.184 (3,17%).
8. Dinas Pemuda dan Olahraga tidak memiliki aset berupa gedung olahraga. Hal ini menjadi kendala dalam meningkatkan prestasi olahraga terutama sebagai sarana latihan atlet. Kondisi sekarang harus melalui proses peminjaman ke OPD lain, dimana terkadang terjadi benturan jadwal penggunaan yang mengganggu proses latihan.
9. Kurangnya SDM olahraga yang intens dan kompeten berupa tenaga keolahragaan yang peduli, mendukung, menangani, serta komitmen dalam pembinaan dan pengelolaan olahraga. SDM olahraga terdiri dari guru olahraga, pelatih, penggiat, dan relawan olahraga. Berdasarkan Indeks Pembangunan Olahraga

Kabupaten Sleman tahun 2024, rasio SDM olahraga dengan penduduk berusia 5 tahun ke atas sebesar 1:806 atau satu orang tenaga keolahragaan melayani 806 penduduk, sedangkan standar kelayakan yang dibutuhkan adalah 1:200.

10. Belum optimalnya penyelenggaraan Kelas Khusus Olahraga (KKO). Kondisi ini ditunjukkan dengan penurunan prestasi Kabupaten Sleman pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) DIY tahun 2025. Kabupaten Sleman menempati peringkat kedua dengan 66 medali emas, 62 perak, dan 96 perunggu. Hasil ini menurun dibandingkan dengan hasil POPDA DIY tahun 2024, dimana perolehan medali kontingen Kabupaten Sleman sebanyak 233 medali (75 emas, 67 perak, 91 perunggu) dengan posisi sebagai juara umum.
11. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembudayaan olahraga sedini mungkin. Berdasarkan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO), nilai indeks partisipasi olahraga di Kabupaten Sleman memperlihatkan pergerakan fluktuatif dari tahun ke tahun. Nilai indeks partisipasi olahraga sebesar 0,160 di tahun 2022 meningkat menjadi 0,349 di tahun 2023 dan mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 0,342. Analisis tingkat partisipasi berdasarkan usia menunjukkan bahwa usia 20 - 44 tahun menunjukkan partisipasi tertinggi yaitu 39,10%. Kelompok usia ini memiliki motivasi yang tinggi untuk olahraga rekreasi dan kompetitif, terutama terkait dengan tujuan kesehatan (Bauman et. al., 2012). Persentase tingkat partisipasi usia 10 - 19 tahun dan 45 - 60 tahun memiliki persentase yang sama yaitu 30,45%. Partisipasi pada kelompok 45 - 60 tahun dipengaruhi oleh faktor kesehatan, tetapi lebih cenderung untuk mempertahankan kebugaran dan mencegah penyakit kronis.
12. Belum optimalnya pendataan kelompok olahraga masyarakat. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman saat ini belum mempunyai data yang valid terkait kelompok olahraga masyarakat.
13. Belum terpenuhinya kebutuhan pembina Pramuka dalam rangka penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Persentase pembina Pramuka yang bersertifikat kursus mahir dasar dan atau kursus lainnya yang relevan dengan kepramukaan pada tahun 2024 baru mencapai 21,90% atau sebanyak 348 orang (dari total jumlah Pembina yang teregistrasi sebanyak 1.589 orang). Jumlah anggota Pramuka di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 adalah 90.466 orang (untuk kategori Siaga-Penggalang-Penegak-Pandega). Dengan demikian rasio total

pembina dan anggota Pramuka adalah 1:57. Berdasarkan Rencana Strategik Kwarnas Tahun 2024-2028 dinyatakan bahwa rasio ideal pembina dan peserta didik Pramuka adalah 1:15. Dengan demikian, jumlah pembina Pramuka yang ideal di Kabupaten Sleman adalah 6.030 orang atau masih defisit sebanyak 4.441 orang.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu strategis yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.10.
Penentuan Isu Strategis

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pengoptimalan aspek kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas	Kapasitas dan kuantitas SDM Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman dalam tata kelola pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga masih kurang	Pola pikir sumber daya manusia yang belum sejalan dengan pembangunan berkelanjutan	Dinamika Demografi	Kualitas SDM yang makin rendah	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Kapasitas dan kuantitas SDM bidang kepemudaan dan olahraga
Pengoptimalan aspek kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas	Kurang representatifnya gedung kantor yang ditempati Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, baik dari aspek luasan maupun kondisi lingkungan		Mobilitas dan Urbanisasi	Infrastruktur dan literasi digital rendah	Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	Sarana dan prasarana gedung perkantoran yang memadai
Pengoptimalan aspek kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas	Berkembangnya karakter generasi <i>strawberry</i> dan budaya instan yang melemahkan daya saing kepemudaan		Dinamika Demografi	Kualitas SDM yang makin rendah	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Kesehatan mental dan peningkatan daya saing kepemudaan
Pengoptimalan aspek kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas	Tantangan permasalahan sosial di kalangan pemuda, seperti kejahatan jalanan atau <i>klithih</i> , kenakalan remaja, efek minuman keras dan narkoba, serta		Dinamika Demografi	Kualitas SDM yang makin rendah	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Permasalahan sosial kekinian di kalangan pemuda

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	lainnya					
Pengoptimalan aspek kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas	Minimnya minat pemuda untuk aktif dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) serta kurangnya tenaga profesional dan komitmen dalam mendukung pengelolaan organisasi kepemudaan		Perubahan Demografi	Kualitas SDM yang makin rendah	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Minat pemuda, tenaga profesional dan komitmen dalam mendukung Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)
Pengoptimalan aspek kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial dalam pelayanan bidang kepemudaan dan olahraga		Digitalisasi dan Transformasi Teknologi	Infrastruktur dan literasi digital rendah	Perkembangan Teknologi Informasi	Optimalisasi teknologi informasi dan media sosial dalam pelayanan bidang kepemudaan dan olahraga
Pengoptimalan aspek kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas	Belum optimalnya pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan ditandai dengan masih banyaknya pemuda yang belum mendapatkan layanan akses terhadap pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan serta dukungan kemandirian atau kewirausahaan		Perubahan Demografi	Kualitas SDM yang makin rendah	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Optimalisasi pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan
Pengoptimalan aspek kesejahteraan masyarakat	Dinas Pemuda dan Olahraga tidak memiliki		Mobilitas dan	Infrastruktur dan literasi	Perkembangan Teknologi	Kepemilikan dan pengelolaan aset

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas	aset berupa gedung dan sarana olahraga yang dikelola sendiri		Urbanisasi	digital rendah	Informasi	berupa gedung dan sarana olahraga secara mandiri untuk fasilitasi latihan olahraga
Pengoptimalan aspek kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas	Kurangnya SDM olahraga yang intens dan kompeten berupa tenaga profesional yang peduli, mendukung, menangani, serta komitmen dalam pembinaan dan pengelolaan olahraga		Perubahan Demografi	Kualitas SDM yang makin rendah	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Kapasitas dan kuantitas SDM profesional dalam pembinaan dan pengelolaan olahraga
Pengoptimalan aspek kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas	Belum optimalnya penyelenggaraan Kelas Khusus Olahraga (KKO)		Perubahan Demografi	Kualitas SDM yang makin rendah	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Optimalisasi penyelenggaraan Kelas Khusus Olahraga (KKO)
Pengoptimalan aspek kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas	Belum optimalnya partisipasi pelajar dan masyarakat dalam kebudayaan olahraga sedini mungkin		Perubahan Demografi	Kualitas SDM yang makin rendah	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Optimalisasi partisipasi pelajar dan masyarakat dalam kebudayaan olahraga
Pengoptimalan aspek kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas	Belum optimalnya pendataan kelompok olahraga masyarakat		Digitalisasi dan Transformasi Teknologi	Infrastruktur dan literasi digital rendah	Perkembangan Teknologi Informasi	Optimalisasi pendataan kelompok olahraga masyarakat

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pengoptimalan aspek kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas	Belum terpenuhinya kebutuhan Pembina pramuka dalam rangka penyelenggaraan pendidikan kepramukaan		Perubahan Demografi	Kualitas SDM yang makin rendah	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Optimalisasi pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kepramukaan

Penjelasan singkat terkait isu-isu strategis sebagaimana diidentifikasi pada tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kapasitas dan kuantitas SDM bidang kepemudaan dan olahraga
Sleman sebagai salah satu kabupaten dengan populasi muda yang dinamis menghadapi tantangan dalam pengembangan kapasitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kepemudaan dan olahraga. Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah kurangnya tenaga terlatih dan berkualitas di kedua sektor tersebut, baik dari segi pelatih olahraga, pembina kepemudaan, maupun fasilitator pengembangan bakat. Selain itu, distribusi SDM yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan menyebabkan kesenjangan akses terhadap program pembinaan.
Di sisi kepemudaan, minimnya keterampilan kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda mengurangi potensi kontribusi mereka dalam pembangunan daerah. Sementara di bidang olahraga, meski Sleman memiliki bakat atletik yang menjanjikan, kurangnya pelatih bersertifikasi dan program pengembangan berkelanjutan menghambat pencapaian prestasi di tingkat regional maupun nasional.
Kebutuhan mendatang mencakup peningkatan pelatihan teknis bagi SDM kepemudaan dan olahraga, serta penyediaan insentif untuk menarik minat tenaga profesional. Penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan komunitas juga diperlukan untuk menciptakan ekosistem pengembangan bakat yang terintegrasi. Selain itu, pentingnya pendataan yang akurat tentang potensi pemuda dan atlet dapat menjadi basis perencanaan program yang tepat sasaran. Dengan langkah-langkah tersebut, Sleman dapat memaksimalkan peran pemuda dan atlet sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan.
2. Sarana dan prasarana gedung yang memadai
Gedung yang representatif menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja, produktivitas kerja dan optimalisasi pelayanan publik. Gedung Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman saat ini masih menempati gedung milik Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan luas 500,57 m². Kondisi lain adalah belum dimilikinya beberapa fasilitas yang idealnya dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga seperti *hall*, ruang olahraga *indoor*, dan lainnya. Selanjutnya kondisi lingkungan juga menunjukkan kelembaban tinggi (sekitar 70%). Adapun standar untuk kesehatan lingkungan tingkat kelembaban yang baik di perkantoran menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran adalah 40-60%. Kondisi ini menuntut perlunya penyediaan gedung Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tersendiri yang baru dan representatif baik secara luasan, kelengkapan fasilitas, maupun kesehatan lingkungan.

3. Peningkatan daya saing kepemudaan
Daya saing pemuda di Kabupaten Sleman menjadi isu strategis seiring dengan tingginya tekanan yang dihadapi generasi muda, baik akibat kompetisi, tantangan ekonomi, maupun dampak perkembangan teknologi. Daya saing kepemudaan tercermin pada nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), dimana IPP Kabupaten Sleman pada tahun 2023 baru mencapai 66,67. Fenomena yang terjadi adalah berkembangnya karakter generasi *strawberry* dan budaya instan yang melemahkan daya saing kepemudaan. Tantangan yang muncul terhadap keberadaan generasi *strawberry* dan budaya instan memerlukan pengembangan karakter yang tangguh dari generasi muda agar menjadi pemuda-pemudi unggul yang berkarakter kuat dan berdaya juang tinggi sehingga dapat turut meningkatkan nilai IPP.
4. Permasalahan sosial kekinian di kalangan pemuda
Permasalahan sosial di kalangan pemuda kian kompleks seiring dengan perkembangan teknologi informasi. DP3AP2KB Kabupaten Sleman (2024) melaporkan bahwa jenis kenakalan remaja di Kabupaten Sleman antara lain merokok, minum minuman beralkohol, kekerasan di jalan, balap liar, vandalisme, perundungan, sampai pornografi dan judi *online*. Permasalahan ini perlu penanganan serius dan komprehensif dengan melibatkan semua pihak.
5. Minat pemuda, tenaga profesional dan komitmen dalam mendukung Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)
Kabupaten Sleman menghadapi tantangan serius dalam menjaga keberlangsungan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) akibat menurunnya minat dan komitmen generasi muda untuk terlibat aktif. Sedikit Pemuda yang aktif berkontribusi di OKP, sebagian besar memilih fokus pada kegiatan individu atau karir profesional. Selain itu OKP juga kesulitan merekrut tenaga profesional (seperti manajer program, *fundraiser*, atau ahli digital) untuk pengembangan organisasi, sehingga banyak OKP bergantung pada relawan dengan kapasitas terbatas.
Permasalahan utama meliputi persepsi pemuda bahwa OKP kurang relevan dengan kebutuhan zaman, minimnya insentif (baik materiil maupun nonmateriil) bagi anggota, serta lemahnya kapasitas manajerial OKP dalam menghadapi tantangan modern seperti digitalisasi dan *sustainability* keuangan. Selain itu, beberapa OKP tidak memiliki program unggulan yang berkelanjutan menyebabkan partisipasi pemuda bersifat temporer (misalnya hanya saat *event* tertentu). Kesenjangan antara OKP tradisional (seperti karang taruna) dengan minat pemuda akan isu-isu kekinian (lingkungan, teknologi, atau kewirausahaan sosial) juga memperparah kondisi ini. OKP diharapkan tidak hanya menjadi wadah pengabdian, tetapi juga ekosistem pengembangan karir pemuda yang menarik bagi generasi Z dan milenial.

6. Optimalisasi teknologi informasi dan media sosial dalam pelayanan bidang kepemudaan dan olahraga
Kabupaten Sleman sebagai kawasan dengan populasi muda yang melek teknologi masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial untuk pelayanan kepemudaan dan olahraga. Masih terjadi kesenjangan antara potensi digital pemuda dengan kapasitas kelembagaan dalam memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan media sosial oleh OKP dan komunitas olahraga masih bersifat sporadis, sehingga potensi *engagement* pemuda belum tergarap maksimal. Pendekatan terpadu diperlukan untuk mengoptimalkan transformasi digital pelayanan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Sleman.
7. Optimalisasi pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan
Kabupaten Sleman menghadapi tantangan kompleks dalam optimalisasi program pembinaan dan pemberdayaan pemuda, meskipun memiliki populasi pemuda yang besar dan dinamis. Kegiatan pembinaan masih bersifat insidental tanpa dampak berkelanjutan. Program yang ada selama ini juga masih dirasa kurang relevan dengan kebutuhan pengembangan karir dan kompetensi di era digital.
Permasalahan utama yang dihadapi meliputi pendekatan pembinaan yang masih konvensional dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik generasi Z dan milenial, keterbatasan anggaran operasional, serta kesenjangan akses pembinaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, belum banyak pembina pemuda yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai standar nasional, berdampak pada kualitas mentoring yang diberikan. Di sisi lain, potensi besar terlihat dari tingkat partisipasi pendidikan tinggi yang mencapai 65% pada kelompok usia 19-24 tahun (BPS Sleman, 2023), menciptakan peluang untuk pengembangan talenta muda berbasis pengetahuan. Pendekatan kolaboratif dan berbasis data diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pemuda Sleman sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan.
8. Kepemilikan dan pengelolaan aset gedung olahraga secara mandiri
Upaya peningkatan prestasi olahraga membutuhkan sarana latihan atlet yang dimiliki dan dikelola sendiri. Hal ini agar jadwal latihan atlet dapat dijamin waktu dan fasilitasnya yang tidak tergantung pihak lain, sehingga atlet tidak terganggu fokus dan *progress* latihannya. Kabupaten Sleman sebenarnya sudah memiliki sarana olahraga yaitu Stadion Maguwoharjo, namun pengelolaannya bukan pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Selama ini jika akan menggunakan harus melalui proses peminjaman dan terkadang terjadi benturan jadwal penggunaan yang mengganggu proses latihan atlet.

9. Kapasitas dan kuantitas SDM profesional dalam pembinaan dan pengelolaan olahraga
Kabupaten Sleman sebagai salah satu pusat pengembangan olahraga di DIY menghadapi tantangan serius dalam penyediaan SDM profesional di bidang pembinaan dan manajemen olahraga. Sedikit Pelatih olahraga yang memiliki sertifikasi nasional, sementara banyak klub olahraga tidak memiliki manajer yang kompeten di bidang manajemen olahraga.
Permasalahan utama meliputi minimnya program pengembangan kapasitas berkelanjutan bagi pelatih dan pengelola olahraga, dimana pelatih yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi setiap tahun masih minim. Selain itu, sistem rekrutmen SDM olahraga yang belum profesional menyebabkan banyak pengurus klub olahraga tidak memiliki latar belakang pendidikan keolahragaan. Tantangan lain adalah maraknya praktik pelatih tanpa sertifikasi berpotensi menimbulkan masalah dalam pembinaan teknik dasar. Di sisi kebutuhan, pertumbuhan industri olahraga belum diimbangi dengan ketersediaan SDM mumpuni. *Stakeholder* olahraga di Sleman menyatakan kesulitan mencari tenaga ahli *sport science*, sekolah olahraga juga kekurangan pelatih spesialis.
10. Optimalisasi penyelenggaraan Kelas Khusus Olahraga (KKO)
Kelas Khusus Olahraga (KKO) merupakan program khusus untuk meningkatkan pembinaan olahraga prestasi sejak dini di kalangan pelajar. KKO di Kabupaten Sleman diselenggarakan di tingkat SMP dengan jumlah masih terbatas dan belum merata. Keberadaan KKO di Kabupaten Sleman untuk tingkat SMP antara lain:
 - a. SMP Negeri 1 Kalasan, dengan kapasitas KKO 32 orang per kelas. Jumlah siswa KKO adalah 96 orang (kelas 7, 8, dan 9);
 - b. SMP Negeri 2 Tempel, dengan kapasitas KKO 32 orang per kelas. Jumlah siswa KKO adalah 96 orang (kelas 7, 8, dan 9);
 - c. SMP Negeri 3 Sleman, dengan kapasitas KKO 32 orang per kelas. Jumlah siswa KKO adalah 96 orang (kelas 7, 8, dan 9).Beberapa opsi diperlukan ke depan untuk mengoptimalkan kontribusi KKO, seperti penambahan kelas, pemerataan di wilayah barat dan utara, atau pengembangan menjadi Sekolah Khusus Olahraga (SKO). Selain itu juga perlu adanya regulasi yang mengatur tentang SKO.
11. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembudayaan olahraga
Pembudayaan olahraga penting dilakukan sedini mungkin, sehingga salah satu upayanya melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam olahraga. Indeks partisipasi olahraga di Kabupaten Sleman tertinggi ada pada kelompok usia 20 - 44 tahun yaitu 39,10%, disusul dengan nilai tidak terpaut jauh untuk kelompok usia 10 - 19 tahun dan 45 - 60 tahun yang memiliki persentase sama yaitu 30,45%. Program berbasis komunitas diperlukan untuk meningkatkan partisipasi pada usia remaja dan lansia, seperti olahraga berbasis sekolah dan aktivitas fisik yang aman bagi lansia.

12. **Optimalisasi pendataan kelompok olahraga masyarakat**
Data merupakan faktor penting sebagai dasar perencanaan program agar tepat sasaran. Permasalahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman hingga saat ini belum mempunyai data yang valid terkait kelompok olahraga masyarakat. Upaya yang lebih serius diperlukan untuk melakukan pendataan secara mudah tetapi lengkap sesuai kebutuhan.
13. **Optimalisasi pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kepramukaan**
Kabupaten Sleman menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka, meskipun memiliki basis anggota yang besar dimana murid SD hingga SMP sebanyak 145.944 orang (Kabupaten Sleman Dalam Angka Tahun 2024). Namun belum semua gugus depan (Gudep) yang aktif menyelenggarakan kegiatan berkala, sementara banyak pembina Pramuka belum memiliki sertifikasi kompetensi dasar.
Permasalahan utama meliputi metode pembinaan yang masih konvensional, belum semua Gudep memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Selain itu, keterbatasan sarana pendukung menyebabkan kegiatan Pramuka dilaksanakan dengan fasilitas seadanya. Tantangan lain adalah minimnya sinergi dengan dunia industri dan pendidikan formal, sehingga baru sedikit sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai kepramukaan dalam kurikulum ekstrakurikuler.
Di sisi lain, potensi besar terlihat dari tingkat partisipasi pramuka menunjukkan minat pemuda terhadap kegiatan berbasis tim dan kepemimpinan. Namun, masih sedikit kegiatan yang berfokus pada pengembangan keterampilan kekinian, seperti literasi digital, kewirausahaan, atau kepedulian lingkungan. Gerakan Pramuka di Sleman berkontribusi sebagai wadah pembentukan karakter dan kompetensi generasi muda.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban”**. Visi ini dijabarkan kedalam 6 misi, 4 tujuan dan 12 sasaran.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemuda dan Olahraga mendukung misi yang ke-1 yaitu “Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian” dan misi ke-4 yaitu “Mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat”, dengan tujuan “Terwujudnya pembangunan kepemudaan dan keolahragaan” dan sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan perangkat daerah”, “Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah”, “Meningkatnya pembangunan keolahragaan” dan “Meningkatnya pembangunan kepemudaan”.

Untuk mendukung ketercapaian visi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029, maka ditetapkan tujuan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029. Tujuan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD. Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 beserta indikator dan target sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Tahun						Sumber Data
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kesehatan masyarakat untuk kehidupan berkualitas	Terwujudnya pembangunan kepemudaan dan keolahragaan		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	IPO adalah indeks komposit yang memberikan gambaran terhadap sembilan lapisan dimensi pembangunan olahraga	Rerata capaian dimensi pembangunan olahraga	Indeks	0,389	0,392	0,395	0,398	0,401	0,404	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	IPP adalah indeks komposit yang memberikan gambaran terhadap tiga lapisan domain pembangunan pemuda.	Rerata capaian domain pembangunan pemuda	Indeks	66,67*)	66,68*)	66,69*)	66,70*)	66,71*)	66,72*)	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian PAN RB atas Laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Predikat AKIP terdiri dari: - predikat AA nilai absolute= >85-100 interpretasi= memuaskan - predikat A nilai absolute= >75-85 interpretasi= sangat baik - predikat B nilai absolute= >65-75 interpretasi= baik - predikat CC nilai absolute= >50-65 interpretasi= cukup baik - predikat D nilai absolute= 0-30 interpretasi= kurang	Hasil penilaian Inspektorat Kabupaten	Predikat Nilai	A (83,25)	A (83,30)	A (83,35)	A (83,40)	A (83,45)	A (83,50)	Inspektorat

Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Tahun						Sumber Data
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Survey Kepuasan Masyarakat adalah hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan.	Angka hasil survey SKM yang dilakukan Perangkat Daerah	Persen	88,18	88,19	88,2	88,21	88,22	88,23	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Meningkatnya pembangunan keolahragaan	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	IPO adalah indeks komposit yang memberikan gambaran terhadap sembilan lapisan dimensi pembangunan olahraga	Rerata capaian dimensi pembangunan olahraga	Indeks	0,389	0,392	0,395	0,398	0,401	0,404	Dinas Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya daya saing daerah	Terwujudnya pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	Meningkatnya pembangunan kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	IPP adalah indeks komposit yang memberikan gambaran terhadap tiga lapisan domain pembangunan pemuda.	Rerata capaian domain pembangunan pemuda	Indeks	66,67*)	66,68*)	66,69*)	66,70*)	66,71*)	66,72*)	Dinas Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berpengetahuan yang merata													

*)target IPP berikut masih menggunakan metode perhitungan lama karena menunggu finalisasi metode baru IPP Nasional

3.2. Strategi Perangkat Daerah

Strategi Renstra PD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Strategi Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas kewirausahaan digital berbasis kompetensi lokal
2. Menggalakkan kampanye media sosial dengan konten inspiratif dan kreatif bagi pemuda dan promosi kegiatan OKP
3. Meningkatkan kapasitas pemuda untuk *critical thinking* dan *digital hygiene* (deteksi *hoax*, keamanan data)
4. Melaksanakan serta menguatkan monitoring dan evaluasi Indeks Pembangunan Pemuda
5. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan bagi pemuda dengan pendekatan yang menarik
6. Meningkatkan kapasitas pengembangan diri melalui pembangunan karakter dan ketahanan mental bagi pemuda
7. Meningkatkan program kreativitas, membangun kompetensi dan menumbuhkan jiwa kompetitif pemuda
8. Memberdayakan potensi OKP yang ada dengan pendekatan kekinian, membangun jaringan alumni OKP untuk mentoring serta menguatkan manajemen, inovasi dan kreativitas OKP
9. Mengembangkan ruang kolaborasi untuk pemuda
10. Memperluas ruang pemberdayaan bagi pemuda untuk menunjukkan kepemimpinan, kepeloporan dan minatnya
11. Menyediakan dan mengoptimalkan pengelolaan aset gedung dan sarana prasarana olahraga secara mandiri
12. Menyelenggarakan *event* olahraga rutin
13. Mengoptimalkan teknologi informasi untuk kampanye berolahraga yang benar
14. Memfasilitasi anggaran untuk kualitas olahraga masyarakat
15. Meningkatkan layanan fasilitas olahraga untuk keluarga (misal sistem diskon)
16. Meningkatkan kapasitas pelatih/penggiat olahraga
17. Kolaborasi dengan instansi terkait untuk beasiswa atlet berprestasi
18. Memberikan apresiasi bagi atlet pelajar dan pelatih berprestasi
19. Mengembangkan manajemen berbasis digital untuk komunitas atau kelompok olahraga
20. Menyelenggarakan *event* gabungan tahunan antar komunitas atau kelompok olahraga
21. Meningkatkan kapasitas komunitas atau kelompok olahraga
22. Mengoptimalkan fasilitas olahraga untuk komunitas atau kelompok olahraga
23. Memfasilitasi dan memberikan apresiasi bagi komunitas atau kelompok olahraga yang berkinerja baik atau inspiratif

24. Memfasilitasi jaminan kecelakaan kerja bagi atlet yang bertanding mewakili (ada SK/SPT) Pemerintah Kabupaten Sleman
25. Mengembangkan *dashboard online* berisi capaian kinerja *real time*
26. Meningkatkan kapasitas SDM Dinas Pemuda dan Olahraga
27. Mengembangkan media dan mekanisme aduan/*feedback* masyarakat
28. Melakukan peningkatan pengelolaan anggaran
29. Mengembangkan Sistem Layanan Digital melalui Integrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemkab Sleman
30. Mengembangkan kerja sama dengan kampus dan sekolah untuk program magang di Dinas Pemuda dan Olahraga
31. Mengembangkan teknologi informasi dalam pelayanan publik
32. Meningkatkan kapasitas SDM Dinas Pemuda dan Olahraga dengan pelatihan *e-government* dan pelayanan publik
33. Melakukan survei kepuasan masyarakat setiap 6 bulan
34. Melakukan sinergi dan kolaborasi dalam pengelolaan fasilitas bekerja sama dengan OPD, pemerintah Kalurahan atau mitra lain
35. Menyediakan ruang dan sarana pelayanan publik yang lebih memadai
36. Memfasilitasi anggaran APBD Sleman untuk pengembangan kapasitas kepramukaan
37. Mengembangkan kegiatan yang menggabungkan unsur kepramukaan, olahraga, dan kepemimpinan
38. Memasukkan materi kepramukaan dalam pelatihan pemuda
39. Memanfaatkan media sosial Dinas Pemuda dan Olahraga untuk promosi kegiatan pramuka
40. Memfasilitasi pelatihan untuk sertifikasi pembina pramuka
41. Melakukan pendampingan pengelolaan organisasi bagi pengurus Kwartir cabang (Kwarcab)
42. Mendukung pengembangan usaha ekonomi produktif bagi organisasi Pramuka
43. Melakukan revitalisasi kaderisasi organisasi pramuka dengan pendekatan kekinian serta meningkatkan pelatihan pembina muda untuk regenerasi kepemimpinan organisasi Pramuka

Adapun penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029	TAHAP VI 2030
Membangun kapasitas, menetapkan standar dan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyiapkan pondasi	Memperkuat kapasitas, kolaborasi kemitraan, standar dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan peran <i>stakeholders</i> , kemitraan, kinerja berbasis standar serta akselerasi pemanfaatan teknologi	Meningkatkan kapasitas dan inovasi, mengembangkan kemitraan, kinerja berbasis standar serta inovasi pemanfaatan	Pemantapan kapasitas kepemimpinan, pemberdayaan <i>stakeholders</i> , kemitraan, kinerja dan pelayanan, serta dukungan	Pemantapan kinerja dan pelayanan prima untuk keberlanjutan peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dan

TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029	TAHAP VI 2030
kualitas dan partisipasi pemuda dan olahraga	untuk mewujudkan kualitas dan partisipasi pemuda dan olahraga	informasi untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dan olahraga	teknologi informasi untuk menjamin keberlanjutan kualitas dan partisipasi pemuda dan olahraga	teknologi informasi	olahraga berbasis daya saing dan pemerataan

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan Renstra PD merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Arah kebijakan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	Terwujudnya pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	1. Membangun kapasitas <i>stakeholder</i> untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).	1. Pembangunan kapasitas SDM yang adaptif dan SOP tata kelola kinerja untuk landasan penguatan kinerja	
2	Meningkatnya pembangunan kepemudaan	2. Memperkuat peran <i>stakeholder</i> dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM).	2. Pengembangan kapasitas SDM dan regulasi yang adaptif serta disiplin movev SOP tata kelola kinerja untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja	
3	Meningkatnya pembangunan keolahragaan	3. Memperkuat jejaring <i>stakeholder</i> dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM).	3. Penguatan kapasitas SDM dan regulasi yang adaptif, kemitraan serta pengembangan media interaktif dan SOP tata kelola kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja	
		4. Mempercepat transformasi digital untuk penguatan jejaring <i>stakeholder</i> .	4. Peningkatan peran SDM dan regulasi yang adaptif, keberlanjutan kemitraan, pengembangan media interaktif, dan inovasi SOP tata kelola kinerja untuk memantapkan akuntabilitas kinerja	
		5. Pemantapan kerja sama <i>pentahelix</i> untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM).	5. Pemantapan peran SDM dan regulasi yang adaptif, Keberlanjutan kemitraan, diversifikasi media interaktif, dan inovasi SOP tata kelola kinerja untuk menjamin keberlanjutan akuntabilitas kinerja	
		6. Kerja sama <i>pentahelix</i> yang berkelanjutan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM).	6. Mewujudkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga yang berkelanjutan dan berkualitas sesuai tuntutan kekinian	
			1. Pembangunan layanan berbasis digital dan kapasitas SDM serta penilaian kepuasan publik untuk landasan pelayanan publik	
			2. Pengembangan layanan berbasis digital dan kapasitas SDM serta penetapan SPM untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	
			3. Penguatan layanan berbasis digital dan kapasitas SDM serta pelaksanaan SPM untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	
			4. Diversifikasi layanan berbasis digital, peningkatan peran SDM serta peningkatan SPM untuk memantapkan kualitas pelayanan publik	
			5. Pemantapan layanan berbasis digital dan peran SDM serta penguatan SPM untuk menjamin keberlanjutan kualitas pelayanan publik yang berkualitas	
			6. Mewujudkan pelayanan publik bidang kepemudaan dan olahraga yang berkualitas, berkelanjutan dan berorientasi kebutuhan	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
		1. Membangun daya saing ekonomi melalui ketahanan air dan pangan, peningkatan produktivitas, penguatan daya tarik dan promosi wisata, peningkatan kapasitas pelaku usaha, dan penciptaan iklim usaha yang sehat, serta optimalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). 2. Mengembangkan daya saing ekonomi melalui penguatan <i>branding</i> dan ekosistem wirausaha, serta kemandirian masyarakat untuk menciptakan nilai tambah, serta optimalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). 3. Meningkatkan daya saing	1. Penyediaan fasilitas dan layanan olahraga, pelaksanaan event olahraga, Pemanfaatan teknologi informasi dan jaminan atlet untuk pondasi kualitas dan partisipasi olahraga masyarakat 2. Pengembangan fasilitas dan layanan olahraga, pelaksanaan event olahraga, penguatan kapasitas stakeholders olahraga dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan kualitas dan partisipasi olahraga masyarakat 3. Peningkatan fasilitas dan layanan, pengembangan event olahraga, penguatan peran stakeholders olahraga dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi olahraga masyarakat 4. Pengembangan event kompetisi, penguatan stakeholders dan diversifikasi pemanfaatan teknologi informasi kekinian untuk menjamin keberlanjutan kualitas dan partisipasi olahraga masyarakat 5. Peningkatan fasilitas dan layanan, peningkatan event kompetisi, pemberdayaan stakeholders olahraga dan pengembangan dukungan teknologi informasi 6. Mewujudkan keberlanjutan peningkatan kualitas dan partisipasi olahraga masyarakat sesuai tren kekinian	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
		ekonomi melalui digitalisasi dan transformasi, sarana pendukung berkualitas, jaringan pasar dan kemitraan, pengembangan ekonomi kreatif, dan pertumbuhan investasi berkelanjutan, serta intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). 4. Meningkatkan kemandirian ekonomi melalui regenerasi pelaku usaha, optimalisasi sumber daya dan penguatan nilai tambah lintas sektor berwawasan lingkungan. 5. Memantapkan kemandirian ekonomi melalui konektivitas dan integrasi ekonomi serta percepatan transformasi dan globalisasi. 6. Mewujudkan perekonomian yang berkualitas melalui ekosistem ekonomi yang resilien, berkelanjutan, dan berdaya saing global.	1. Pembangunan kapasitas pemuda, penghitungan IPP, penguatan OKP dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pondasi kualitas dan partisipasi pemuda 2. Pengembangan kapasitas pemuda, penguatan IPP, penguatan OKP, kolaborasi jaringan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan kualitas dan partisipasi pemuda 3. Penguatan peran pemuda, penguatan IPP, inovasi OKP, kolaborasi jaringan dan akselerasi pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda 4. Peningkatan inovasi dan jaringan pemuda OKP, pemantapan IPP dan diversifikasi pemanfaatan teknologi informasi untuk menjamin keberlanjutan kualitas dan partisipasi pemuda 5. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, pemberdayaan OKP, peningkatan kemitraan, peningkatan IPP dan pengembangan dukungan teknologi informasi 6. Mewujudkan keberlanjutan peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda berbasis daya saing dan budaya lokal	

Penyajian tujuan, sasaran, dan pentahapan dimulai dari tahun 2025 – 2030. Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2030.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Dalam upaya untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Pendanaan Indikatif. Berikut ini disajikan resume program, kegiatan, subkegiatan pagu indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman selama periode tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1.

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kesehatan masyarakat untuk kehidupan berkualitas	Terwujudnya pembangunan kepemudaan dan keolahragaan				Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) dan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan perangkat daerah			Nilai AKIP perangkat daerah		
			Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya layanan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersedia tepat waktu	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya walidata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase dokumen laporan keuangan tersedia tepat waktu	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah			Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah		
			Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	
				Meningkatnya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Meningkatnya pelayanan penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Meningkatnya pelayanan penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan jasa penunjang	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya pembangunan keolahragaan			Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)		
			Meningkatnya prestasi dalam kompetisi olahraga		Persentase prestasi olahraga di tingkat Provinsi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
			Meningkatnya prestasi dalam kompetisi olahraga		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Dimensi Performa	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pembinaan atlet muda	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	
				Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah <i>event</i> olahraga tingkat daerah yang diselenggarakan	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kejuaraan Olahraga <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi	Cakupan pembinaan olahraga	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
				Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				memajukan Olahraga			
				Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)	2025
				Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
				Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Sub Kegiatan pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	
			Meningkatnya pembangunan Sumber Daya Manusia Olahraga		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Dimensi Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang dilakukan pembinaan	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
				Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di	Persentase organisasi organisasi keolahragaan di	Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				kabupaten/kota sesuai standar nasional	kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional		
				Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
			Meningkatnya kualitas kebugaran masyarakat		Persentase kegiatan olahraga masyarakat yang difasilitasi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
			Meningkatnya kualitas kebugaran masyarakat		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Dimensi Kebugaran	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
				Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah organisasi olahraga rekreasi yang dibina	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
				Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	
				Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	
				Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga	Sub Kegiatan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Rekreasi		
Meningkatnya daya saing daerah		Meningkatnya pembangunan kepemudaan			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		
			Meningkatnya peran pemuda dalam kewirausahaan		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	
			Meningkatnya peran pemuda dalam kewirausahaan		Indeks Pembangunan Pemuda domain ketenagakerjaan layak	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	
				Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase Wirausaha Muda	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
			Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi		Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
				Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
				Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berpengetahuan yang merata			Meningkatnya peran pemuda dalam partisipasi dan kepemimpinan		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) domain Partisipasi dan Kepemimpinan	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	
				Meningkatnya partisipasi pembina Pramuka yang aktif dalam kegiatan pembinaan kepramukaan	Persentase pembina pramuka dengan sertifikasi Kursus Mahir Dasar (KMD)	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
				Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	

Tabel 4.2.
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				46.424.837.824,00		27.359.811.594,00		36.733.000.000,00		26.397.711.000,00		36.957.194.000,00		27.509.264.000,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				6.767.014.349,00		6.974.514.729,00		5.810.284.500,00		6.163.953.924,00		5.826.784.500,00		6.163.953.924,00	
Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran (%)	100	-	1.086.536.475,00	100	1.279.643.005,00	100	1.126.865.500,00	100	1.195.901.900,00	100	1.127.965.500,00	100	1.195.901.900,00	
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100		100		100		100		100		100		
2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	209.123.200,00	100	258.017.050,00	100	220.123.200,00	100	284.100.000,00	100	220.123.200,00		284.100.000,00	
Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	209.123.200,00	1	258.017.050,00	1	220.123.200,00	1	284.100.000,00	1	220.123.200,00	1	284.100.000,00	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	37	25		25		25		25		25		25		

2.19.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				194.373.200,00		237.417.050,00		205.373.200,00		262.000.000,00		205.373.200,00		262.000.000,00	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	194.373.200,00	1	237.417.050,00	1	205.373.200,00	1	262.000.000,00	1	205.373.200,00	1	262.000.000,00	
2.19.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				14.750.000,00		20.600.000,00		14.750.000,00		22.100.000,00		14.750.000,00		22.100.000,00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	37	25	14.750.000,00	25	20.600.000,00	25	14.750.000,00	25	22.100.000,00	25	14.750.000,00	25	22.100.000,00	
2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				248.077.975,00		313.152.900,00		285.654.200,00		290.713.800,00		286.754.200,00		290.713.800,00	
Meningkatnya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	100	100		100		100		100		100		100		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	248.077.975,00	1	313.152.900,00	1	285.654.200,00	1	290.713.800,00	1	286.754.200,00	1	290.713.800,00	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1		

2.19.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.813.800,00		10.098.000,00		10.600.000,00		11.200.000,00		11.700.000,00		11.200.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	4.813.800,00	1	10.098.000,00	1	10.600.000,00	1	11.200.000,00	1	11.700.000,00	1	11.200.000,00	
2.19.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				73.290.900,00		98.615.000,00		73.290.900,00		73.290.900,00		73.290.900,00		73.290.900,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	73.290.900,00	1	98.615.000,00	1	73.290.900,00	1	73.290.900,00	1	73.290.900,00	1	73.290.900,00	
2.19.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				92.060.700,00		92.517.000,00		86.300.000,00		88.300.000,00		86.300.000,00		88.300.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	92.060.700,00	1	92.517.000,00	1	86.300.000,00	1	88.300.000,00	1	86.300.000,00	1	88.300.000,00	
2.19.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				17.634.675,00		17.591.400,00		17.591.400,00		17.591.400,00		17.591.400,00		17.591.400,00	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	17.634.675,00	1	17.591.400,00	1	17.591.400,00	1	17.591.400,00	1	17.591.400,00	1	17.591.400,00	
2.19.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				6.000.000,00		20.400.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	6.000.000,00	1	20.400.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	
2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48.406.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	48.406.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	
2.19.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				11.871.900,00		14.331.500,00		11.871.900,00		14.331.500,00		11.871.900,00		14.331.500,00	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	11.871.900,00	1	14.331.500,00	1	11.871.900,00	1	14.331.500,00	1	11.871.900,00	1	14.331.500,00	

2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6.000.000,00		61.884.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	
Meningkatnya pelayanan penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	100	100		100		100		100		100		100		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	9	11	6.000.000,00	11	61.884.000,00	10	6.000.000,00	6	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	
2.19.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				6.000.000,00		61.884.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	9	11	6.000.000,00	11	61.884.000,00	10	6.000.000,00	6	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	
2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				274.255.600,00		291.594.055,00		274.255.600,00		274.255.600,00		274.255.600,00		274.255.600,00	
Meningkatnya pelayanan penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan jasa penunjang	100	100		100		100		100		100		100		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	274.255.600,00	1	291.594.055,00	1	274.255.600,00	1	274.255.600,00	1	274.255.600,00	1	274.255.600,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1		
2.19.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	
2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				64.800.000,00		64.800.000,00		64.800.000,00		64.800.000,00		64.800.000,00		64.800.000,00	

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	64.800.000,00	1	64.800.000,00	1	64.800.000,00	1	64.800.000,00	1	64.800.000,00	1	64.800.000,00	
2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				202.455.600,00		219.794.055,00		202.455.600,00		202.455.600,00		202.455.600,00		202.455.600,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	202.455.600,00	1	219.794.055,00	1	202.455.600,00	1	202.455.600,00	1	202.455.600,00	1	202.455.600,00	
2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				349.079.700,00		354.995.000,00		340.832.500,00		340.832.500,00		340.832.500,00		340.832.500,00	
Meningkatnya pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100		100		100		100		100		100		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	15	349.079.700,00	15	354.995.000,00	15	340.832.500,00	15	340.832.500,00	15	340.832.500,00	15	340.832.500,00	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	13	13		13		13		13		13		13		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5		5		5		5		5		5		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		1		
2.19.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				180.259.700,00		179.377.500,00		179.377.500,00		179.377.500,00		179.377.500,00		179.377.500,00	

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	15	180.259.700,00	15	179.377.500,00	15	179.377.500,00	15	179.377.500,00	15	179.377.500,00	15	179.377.500,00	
2.19.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				5.100.000,00		11.735.000,00		11.735.000,00		11.735.000,00		11.735.000,00		11.735.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	13	13	5.100.000,00	13	11.735.000,00	13	11.735.000,00	13	11.735.000,00	13	11.735.000,00	13	11.735.000,00	
2.19.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				49.720.000,00		46.720.000,00		46.720.000,00		46.720.000,00		46.720.000,00		46.720.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	49.720.000,00	5	46.720.000,00	5	46.720.000,00	5	46.720.000,00	5	46.720.000,00	5	46.720.000,00	
2.19.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				114.000.000,00		117.162.500,00		103.000.000,00		103.000.000,00		103.000.000,00		103.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	114.000.000,00	1	117.162.500,00	1	103.000.000,00	1	103.000.000,00	1	103.000.000,00	1	103.000.000,00	
Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan (%)	100	100		100	4.988.871.724,00	100	4.683.419.000,00	100	4.968.052.024,00	100	4.698.819.000,00	100	4.968.052.024,00	
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100		100		
2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						34.798.500,00		27.598.900,00		27.798.900,00		42.998.900,00		27.798.900,00	
Meningkatnya layanan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersedia tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100		

	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersedia tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	34.799.250,00	2	34.798.500,00	2	27.598.900,00	2	27.598.900,00	2	42.998.900,00	2	27.798.900,00	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		5		4		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	23	23		23		23		23		23		23		
2.19.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				22.199.875,00		12.199.600,00		5.000.000,00		5.000.000,00		20.000.000,00		5.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	22.199.875,00	4	12.199.600,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	5	20.000.000,00	4	5.000.000,00	
2.19.01.2.01.0002 - Koordinasi dan				1.599.750,00		1.599.600,00		1.599.600,00		1.599.600,00		1.599.600,00		1.599.600,00	

Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	1.599.750,00	2	1.599.600,00	2	1.599.600,00	2	1.599.600,00	2	1.599.600,00	2	1.599.600,00	
2.19.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		2.000.000,00		2.200.000,00		2.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	1.800.000,00	2	1.800.000,00	2	1.800.000,00	2	2.000.000,00	2	2.200.000,00	2	2.000.000,00	
2.19.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	1.600.000,00	2	1.600.000,00	2	1.600.000,00	2	1.600.000,00	2	1.600.000,00	2	1.600.000,00	
2.19.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1.699.750,00		1.699.700,00		1.699.700,00		1.699.700,00		1.699.700,00		1.699.700,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	1.699.750,00	2	1.699.700,00	2	1.699.700,00	2	1.699.700,00	2	1.699.700,00	2	1.699.700,00	
2.19.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.899.875,00		5.899.600,00		5.899.600,00		5.899.600,00		5.899.600,00		5.899.600,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	23	23	5.899.875,00	23	5.899.600,00	23	5.899.600,00	23	5.899.600,00	23	5.899.600,00	23	5.899.600,00	
2.19.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	

Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.639.678.624,00		4.954.073.224,00		4.655.820.100,00		4.940.253.124,00		4.655.820.100,00		4.940.253.124,00	
Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase dokumen laporan keuangan tersedia tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	32	5.639.678.624,00	32	5.639.673.224,00	35	4.655.820.100,00	35	4.940.253.124,00	35	4.655.820.100,00	35	4.940.253.124,00	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4		4		
2.19.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.411.691.624,00		5.411.691.624,00		4.500.000.000,00		4.711.691.624,00		4.500.000.000,00		4.711.691.624,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	32	5.411.691.624,00	32	5.411.691.624,00	35	4.500.000.000,00	35	4.711.691.624,00	35	4.500.000.000,00	35	4.711.691.624,00	
2.19.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				222.167.000,00		222.161.500,00		150.000.000,00		222.161.500,00		150.000.000,00		222.161.500,00	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	222.167.000,00	12	222.161.500,00	12	150.000.000,00	12	222.161.500,00	12	150.000.000,00	12	222.161.500,00	
2.19.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/				5.820.000,00		5.820.100,00		5.820.100,00		6.400.000,00		5.820.100,00		6.400.000,00	

Semesteran SKPD															
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	5.820.000,00	4	5.820.100,00	4	5.820.100,00	4	6.400.000,00	4	5.820.100,00	4	6.400.000,00	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				2.148.335.150,00		2.603.998.650,00		588.032.000,00		2.803.998.650,00		588.032.000,00		3.412.994.857,00	
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	18,3	18,34		0	1.146.765.400,00	0	200.000.000,00	0	1.346.765.400,00	0	200.000.000,00	0	1.346.765.400,00	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri														
2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				512.741.000,00		1.146.765.400,00		200.000.000,00		1.346.765.400,00		200.000.000,00		1.346.765.400,00	
Meningkatnya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	96,12	98,67	512.741.000,00	96,28		96,36		96,44		96,52		96,60		
	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)		120		120	1.146.765.400,00	122	200.000.000,00	124	1.346.765.400,00	126	200.000.000,00	128	1.346.765.400,00	
2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan				512.741.000,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00	

tingkat kabupaten/kota															
Meningkatnya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	96,12	98,67	512.741.000,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota						1.146.765.400,00		200.000.000,00		1.346.765.400,00		200.000.000,00		1.346.765.400,00	
Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)			-	120	1.146.765.400,00	122	200.000.000,00	124	1.346.765.400,00	126	200.000.000,00	128	1.346.765.400,00	
Meningkatnya peran pemuda dalam kewirausahaan	Indeks Pembangunan Pemuda domain ketenagakerjaan layak	70,00	71	1.635.594.150,00	71	1.457.233.250,00	71,5	388.032.000,00	72	1.457.233.250,00	72,5	388.032.000,00	73	2.066.229.457,00	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	3,38	3,55		0		0		0		0		0		
2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				1.635.594.150,00		1.457.233.250,00		388.032.000,00		1.457.233.250,00		388.032.000,00		2.066.229.457,00	
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	3,38	3,55		3,68		3,74		3,86		3,92		3,97		

Meningkatnya partisipasi pemuda dalam berorganisasi	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	18,30	18,34		18,38		18,43		18,47		18,51		18,55		
	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	870	1.870	1.635.594.150,00	1.870	1.457.233.250,00	2.190	388.032.000,00	2.515	1.457.233.250,00	2.845	388.032.000,00	3.180	2.066.229.457,00	
2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota				1.119.659.500,00		791.054.000,00		150.000.000,00		791.054.000,00		150.000.000,00		1.337.873.907,00	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	870	1410	1.119.659.500,00	1.870	791.054.000,00	2.190	150.000.000,00	2.515	791.054.000,00	2.845	150.000.000,00	3.180	1.337.873.907,00	
	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	330	360		360		360		360		360		360		
	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	13	13		13		13		15		15		15		
2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota				25.868.100,00		38.032.000,00		38.032.000,00		38.032.000,00		38.032.000,00		38.032.000,00	

Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	1	1	25.868.100,00	1	38.032.000,00	1	38.032.000,00	1	38.032.000,00	1	38.032.000,00	1	38.032.000,00	
2.19.02.2.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota				215.056.750,00		415.313.750,00		100.000.000,00		415.313.750,00		100.000.000,00		415.313.750,00	
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	330	360	215.056.750,00	360	415.313.750,00	360	100.000.000,00	360	415.313.750,00	360	100.000.000,00	360	415.313.750,00	
2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota				275.009.800,00		212.833.500,00		100.000.000,00		212.833.500,00		100.000.000,00		275.009.800,00	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	13	13	275.009.800,00	13	212.833.500,00	13	100.000.000,00	15	212.833.500,00	15	100.000.000,00	15	275.009.800,00	
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				36.144.945.075,00		16.933.003.965,00		29.734.683.500,00		16.129.758.426,00		29.742.377.500,00		16.632.315.219,00	
Meningkatnya kualitas kebugaran masyarakat	Persentase kegiatan olahraga masyarakat yang difasilitasi (%)	53,85	75		0	9.357.549.600,00	0	28.900.000.000,00	0	9.298.451.600,00	0	28.900.000.000,00	0	9.298.451.600,00	
	Persentase prestasi olahraga di tingkat provinsi														
	Indeks pembangunan olahraga (IPO) dimensi kebugaran (Indeks)	0,157	-		0,158		0,158		0,159		0,159		0,16		
2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						9.357.549.600,00		28.900.000.000,00		9.298.451.600,00		28.900.000.000,00		9.298.451.600,00	

Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang dilakukan pembinaan	3	3		3		3		3		3		3		
	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)	2	2	27.791.997.425,00	2	9.357.549.600,00	2	28.900.000.000,00	2	9.298.451.600,00	2	28.900.000.000,00	2	9.298.451.600,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	3		3		3		3		3		3		
2.19.03.2.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota				382.215.600,00		421.349.600,00		50.000.000,00		362.251.600,00		50.000.000,00		362.251.600,00	
Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)	2	2	382.215.600,00	2	421.349.600,00	2	50.000.000,00	2	362.251.600,00	2	50.000.000,00	2	362.251.600,00	
2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait				27.409.781.825,00		8.936.200.000,00		28.850.000.000,00		8.936.200.000,00		28.850.000.000,00		8.936.200.000,00	
Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	3	27.409.781.825,00	3	8.936.200.000,00	3	28.850.000.000,00	3	8.936.200.000,00	3	28.850.000.000,00	3	8.936.200.000,00	
Meningkatnya pembangunan Sumber Daya Manusia olahraga	Indeks pembangunan olahraga (IPO) dimensi sumber daya manusia (Indeks)	0,27	0,294	3.298.471.025,00	0,294	2.779.851.133,00	0,304	28.000.000,00	0,314	1.835.703.594,00	0,324	28.700.000,00	0,334	1.835.703.594,00	
2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				3.298.471.025,00		2.779.851.133,00		28.000.000,00		1.835.703.594,00		28.700.000,00		1.835.703.594,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah organisasi olahraga rekreasi yang dibina	126	127		128		129		130		131		132		

	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	10	10	3.298.471.025,00	10	2.779.851.133,00	10	28.000.000,00	10	1.835.703.594,00	10	28.700.000,00	10	1.835.703.594,00	
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1		
2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi						100.798.633,00		6.500.000,00		1.758.103.594,00		6.500.000,00		1.758.103.594,00	
Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	1		-	1	100.798.633,00	1	6.500.000,00	1	1.758.103.594,00	1	6.500.000,00	1	1.758.103.594,00	
2.19.03.2.05.0008 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat				3.234.471.625,00		2.615.053.100,00		6.500.000,00		7.000.000,00		7.200.000,00		7.000.000,00	
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	1	1	3.234.471.625,00	1	2.615.053.100,00	1	6.500.000,00	1	7.000.000,00	1	7.200.000,00	1	7.000.000,00	
2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional				63.999.400,00		63.999.400,00		15.000.000,00		70.600.000,00		15.000.000,00		70.600.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	10	10	63.999.400,00	10	63.999.400,00	10	15.000.000,00	10	70.600.000,00	10	15.000.000,00	10	70.600.000,00	

Meningkatnya prestasi dalam kompetisi olahraga	Indeks pembangunan olahraga (IPO) dimensi performa (%)	0,18	0,19	5.054.476.625,00	0,19	4.995.603.232,00	0,19	806.683.500,00	0,2	4.995.603.232,00	0,2	813.677.500,00	0,21	5.498.160.025,00	
	Persentase prestasi olahraga di tingkat provinsi (%)	28,96	0		0		0		0		0		0		
2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				601.358.225,00		669.878.225,00		350.952.918,00		669.878.225,00		357.946.918,00		669.878.225,00	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pembinaan atlet muda	0	40		41		42		43		44		45		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen)	1	1	601.358.225,00	1	669.878.225,00	1	350.952.918,00	1	669.878.225,00	1	357.946.918,00	1	669.878.225,00	
2.19.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				601.358.225,00		669.878.225,00		350.952.918,00		669.878.225,00		357.946.918,00		669.878.225,00	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen)	1	1	601.358.225,00	1	669.878.225,00	1	350.952.918,00	1	669.878.225,00	1	357.946.918,00	1	669.878.225,00	
2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat				1.925.052.375,00		1.655.730.582,00		55.730.582,00		1.655.730.582,00		55.730.582,00		1.858.287.375,00	

Daerah Kabupaten/Kota															
Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah event olahraga tingkat daerah yang diselenggarakan	6	6		6		6		6		6		6		
	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	6	6	1.925.052.375,00	6	1.655.730.582,00	6	55.730.582,00	6	1.655.730.582,00	6	55.730.582,00	6	1.858.287.375,00	
2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1.925.052.375,00		1.655.730.582,00		55.730.582,00		1.655.730.582,00		55.730.582,00		1.858.287.375,00	
Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	6	6	1.925.052.375,00	6	1.655.730.582,00	6	55.730.582,00	6	1.655.730.582,00	6	55.730.582,00	6	1.858.287.375,00	
2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				2.528.066.025,00		2.469.994.425,00		400.000.000,00		2.669.994.425,00		400.000.000,00		2.969.994.425,00	
Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi	Cakupan pembinaan olahraga	95	95		95		95		95		95		95		
	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	233	231	2.528.066.025,00	231	2.469.994.425,00	232	400.000.000,00	233	2.669.994.425,00	234	400.000.000,00	235	2.969.994.425,00	
	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	520	520		520		540		540		540		540		
	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)		500		500		500		550		550		600		
	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1													

	(Pelatda)														
2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah						745.700.225,00		150.000.000,00		745.700.225,00		150.000.000,00		745.700.225,00	
Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)		0	-	500	745.700.225,00	500	150.000.000,00	550	745.700.225,00	550	150.000.000,00	600	745.700.225,00	
2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga				1.139.999.000,00		1.084.255.400,00		0,00		1.284.255.400,00		0,00		1.584.255.400,00	
Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	233	230	1.139.999.000,00	231	1.084.255.400,00	232	0,00	233	1.284.255.400,00	234	0,00	235	1.584.255.400,00	
2.19.03.2.03.0008 - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				745.700.225,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) (Pelatda)	1	1	745.700.225,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota				246.393.000,00		246.393.000,00		100.000.000,00		246.393.000,00		100.000.000,00		246.393.000,00	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	520	520	246.393.000,00	520	246.393.000,00	540	100.000.000,00	540	246.393.000,00	540	100.000.000,00	540	246.393.000,00	

2.19.03.2.03.0010 - pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				395.973.800,00		393.645.800,00		150.000.000,00		393.645.800,00		150.000.000,00		393.645.800,00	
Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	2	2	395.973.800,00	2	393.645.800,00	2	150.000.000,00	2	393.645.800,00	2	150.000.000,00	2	393.645.800,00	
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				1.364.543.250,00		848.294.250,00		600.000.000,00		1.300.000.000,00		800.000.000,00		1.300.000.000,00	
Meningkatnya peran pemuda dalam partisipasi dan kepemimpinan	Indeks pembangunan pemuda (IPP) domain partisipasi dan kepemimpinan (Indeks)	50,00	-	1.364.543.250,00	51,00	848.294.250,00	51,5	600.000.000,00	52	1.300.000.000,00	52,5	800.000.000,00	53	1.300.000.000,00	
	Persentase pembina pramuka dengan sertifikasi Kursus Mahir Dasar (KMD) (%)	21,9	24		49,26		50,11		50,83		51,45		52		
2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				1.364.543.250,00		848.294.250,00		600.000.000,00		1.300.000.000,00		800.000.000,00		1.300.000.000,00	
Meningkatnya partisipasi pembina Pramuka yang aktif dalam kegiatan pembinaan Kepramukaan	Persentase pembina pramuka dengan sertifikasi Kursus Mahir Dasar (KMD)	39,84	48,25		49,26		50,11		50,83		51,45		52		
	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	1	1	1.364.543.250,00	1	848.294.250,00	1	600.000.000,00	1	1.300.000.000,00	1	800.000.000,00	1	1.300.000.000,00	
2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				1.364.543.250,00		848.294.250,00		600.000.000,00		1.300.000.000,00		800.000.000,00		1.300.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	1	1	1.364.543.250,00	1	848.294.250,00	1	600.000.000,00	1	1.300.000.000,00	1	800.000.000,00	1	1.300.000.000,00	

*)target IPP berikut masih menggunakan metode perhitungan lama karena menunggu finalisasi metode baru IPP Nasional

Tabel 4.3.

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan		Keterangan
Peningkatan akses dan Kapasitas UMKM, dan penciptaan wirausaha muda	Meningkatnya peran pemuda dalam kewirausahaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	
	Meningkatnya peran pemuda dalam partisipasi dan kepemimpinan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	

Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan		Keterangan
Mewujudkan ekosistem pariwisata, kebudayaan, keolahragaan, dan ekonomi kreatif	Meningkatnya prestasi dalam kompetisi olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>) Seleksi Atlet Daerah Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	
	Meningkatnya pembangunan SDM Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	

Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan		Keterangan
	Meningkatnya kualitas kebugaran masyarakat	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dampak). Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan. Indikator kinerja pada perangkat daerah meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 2025-2030, maka IKU dan IKK pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,389	0,392	0,395	0,398	0,401	0,404	
2	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	66,67	66,68	66,69	66,7	66,71	66,72	
3	Nilai AKIP perangkat daerah	Predikat Nilai	A (83,25)	A (83,30)	A (83,35)	A (83,40)	A (83,45)	A (83,50)	
4	Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	88,18	88,19	88,2	88,21	88,22	88,23	

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,38	0,389	0,392	0,395	0,398	0,401	0,404	
2	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	66,67	66,67	66,68	66,69	66,7	66,71	66,72	
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	3,38	3,55	3,68	3,74	3,86	3,92	3,97	
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	18,30	18,34	18,38	18,43	18,47	18,51	18,55	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kabupaten Sleman tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, yang memuat strategi, arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Renstra-PD Tahun 2025-2029 disusun sebagai upaya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sleman selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Renstra-PD ini akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah. Renstra-PD Kabupaten Sleman 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang terpadu dan searah dengan RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2025-2029.

Dalam rangka pelaksanaan Renstra-PD dimaksud, perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renstra-PD tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran di masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
2. Renstra-PD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) setiap tahunnya, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Penguatan peran Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) perlu dilakukan dan ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra-PD tahun 2025-2029 dan Renja PD, termasuk melakukan sosialisasi kepada seluruh komponen aparat baik internal dan/atau eksternal aparat Perangkat Daerah, instansi terkait maupun masyarakat luas;
4. Penjabaran lebih lanjut Renstra-PD tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Renja-PD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah serta bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi segala kemungkinan tantangan yang akan dihadapi.



LAMPIRAN

POHON KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pohon Kinerja OPD

Perangkat Daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kode OPD	2.19.0.00.0.00.01.0000
Tujuan OPD	Terwujudnya pembangunan
kepemudaan	
	dan keolahragaan
Indikator	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)
Target/Satuan	0,389/ Indeks
Indikator	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Target/Satuan	66,67/ Indeks
Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) B
Target/Satuan	-
Tahun	2025

STRATEGIC Pemda 4390

Strategic	Meningkatnya Pembangunan pemuda dan keolaharagaan
Indikator 1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Target/Satuan	-/-
Indikator 2	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)
Target/Satuan	-/-
Perangkat Daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Keterangan	-
Status	pokin dari pemda / Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

STRATEGIC 4506

Strategic	Meningkatnya Pembangunan Kepemudaan
Indikator	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Target/Satuan	66,67*)/ Indeks
Perangkat Daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Keterangan	*) target IPP berikut masih menggunakan metode perhitungan lama karena menunggu finalisasi metode baru IPP Nasional

TACTICAL PEMDA 4391

Tactical	Meningkatnya pembangunan Pemuda di bidang pendidikan dan partisipasi sosial dan politik
Indikator	Indeks Pembangunan Pemuda Domain Partisipasi dan Kepemimpinan
Target/Satuan	-/-
Perangkat Daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Keterangan	-
Status	pokin dari pemda / Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

TACTICAL PEMDA 4392

Tactical	Meningkatnya prestasi dalam kompetisi olahraga
Indikator	IPO dimensi pertama
Target/Satuan	-/-
Perangkat Daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Keterangan	-
Status	pokin dari pemda / Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

TACTICAL PEMDA 4393

Tactical	Meningkatnya pembangunan SDM Olahraga
Indikator	IPO dimensi SDM
Target/Satuan	-/-
Perangkat Daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Keterangan	-
Status	pokin dari pemda / Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

TACTICAL PEMDA 4394

Tactical	Meningkatnya paritipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
Indikator	Persentase wirausaha pemuda
Target/Satuan	- / Persen
Perangkat Daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Keterangan	-
Status	pokin dari pemda / Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

TACTICAL PEMDA 4511

Tactical	Meningkatnya peran pemuda Dalam kewirausahaan
Indikator	Indeks Pembangunan Pemuda domain ketenagakerjaan layak 70,5*) / Indeks
Target/Satuan	-
Perangkat Daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Keterangan	*)target IPP berikut masih menggunakan metode perhitungan lama karena menunggu finalisasi metode baru IPP Nasional

TACTICAL PEMDA 4515

Tactical	Meningkatnya peran pemuda dalam partisipasi dan kepemimpinan
Indikator	Indeks Pembangunan Pemuda domain Partisipasi dan Kepemimpinan
Target/Satuan	50,5*) / Indeks
Perangkat Daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Keterangan	*)target IPP berikut masih menggunakan metode perhitungan lama karena menunggu finalisasi metode baru IPP Nasional

OPERATIONAL 4521

Operational	Meningkatnya paritipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
Indikator	Persentase wirausaha pemuda
Target/Satuan	3,97 / Persentase
Perangkat Daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Keterangan	-

OPERATIONAL 4531

Operational	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam berorganisasi
Indikator	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
Target/Satuan	18,55 / Persentase
Perangkat Daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Keterangan	-

OPERATIONAL 4533

Operational	Meningkatnya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/ kota
Indikator	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/ kota
Target/Satuan	96,60 / Persentase
Perangkat Daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Keterangan	-

OPERATIONAL 4523

Operational	Meningkatnya partisipasi pembina Pramuka yang aktif dalam kegiatan pembinaan Kepramukaan
Indikator	Persentase pembina pramuka dengan sertifikasi Kursus Mahir Dasar (KMD)
Target/Satuan	52 / Persentase
Perangkat Daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Keterangan	-

OPERATIONAL 14522

Operational N	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota
Indikator	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
Target/Satuan	3180 / orang
Perangkat Daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Keterangan	-

OPERATIONAL 14532

Operational N	Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
Indikator	Jumlah Kab/Kota Dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
Target/Satuan	1/ kegiatan
Perangkat Daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Keterangan	-

OPERATIONAL 14539

Operational N	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota
Indikator	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/ kota yang haknya terpenuhi
Target/Satuan	360/ orang
Perangkat Daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Keterangan	-

OPERATIONAL 14532

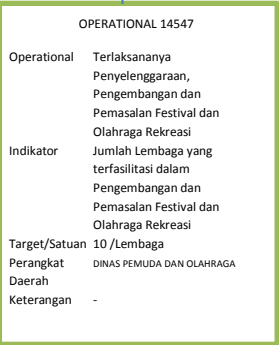
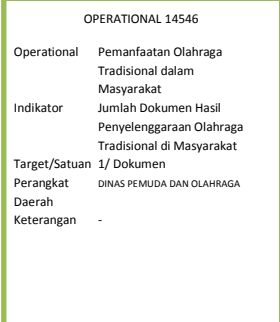
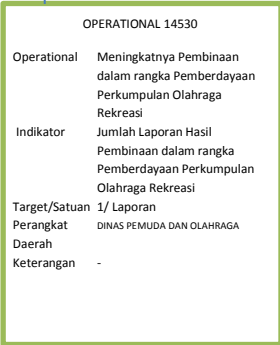
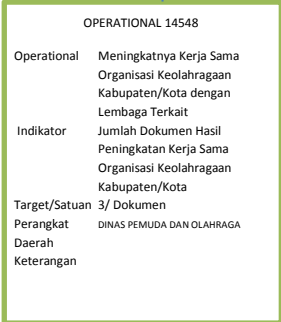
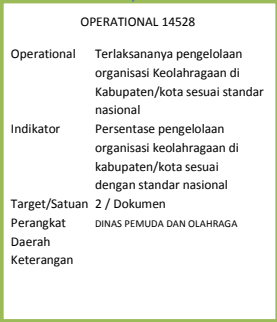
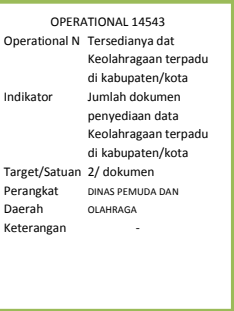
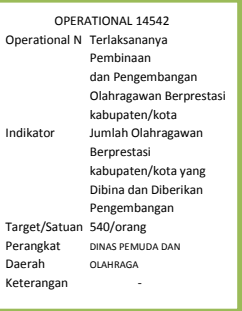
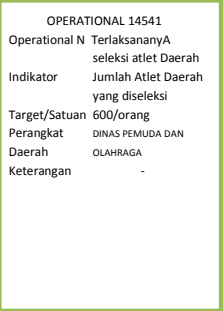
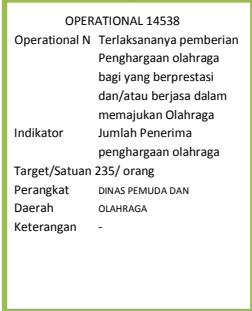
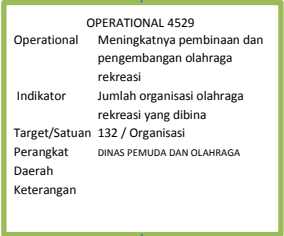
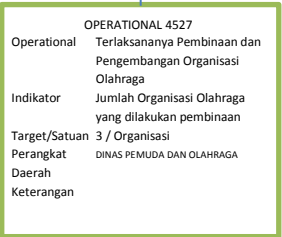
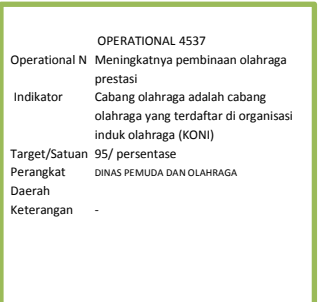
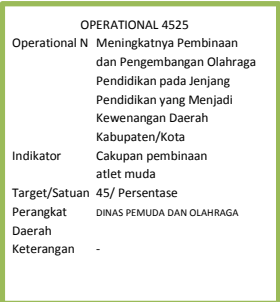
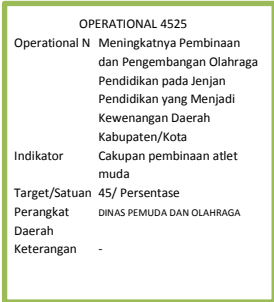
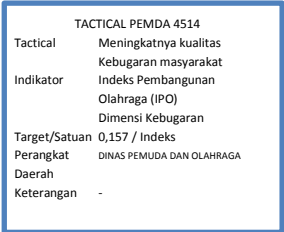
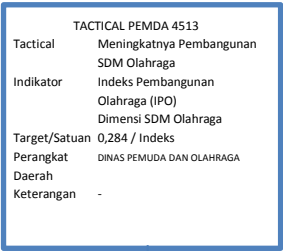
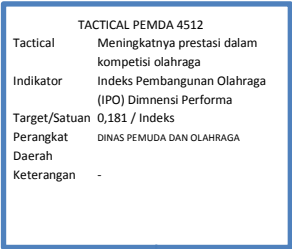
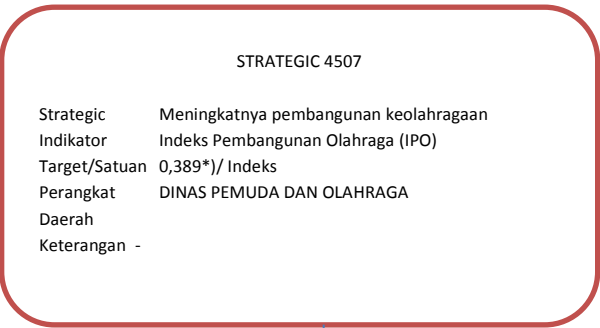
Operational N	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/ kota
Indikator	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/ kota dari Seluruh Kabupaten/ kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda
Target/Satuan	15/ orang
Perangkat Daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Keterangan	-

OPERATIONAL 14532

Operational N	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
Indikator	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
Target/Satuan	128/ organisasi
Perangkat Daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Keterangan	-

OPERATIONAL 14524

Operational	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
Indikator	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya
Target/Satuan	1 / Organisasi
Perangkat Daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Keterangan	-



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2025-2029

CASCADING RENSTRA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025-2029

[illegible]

Analisa SWOT untuk menyusun strategi dan arah kebijakan

No	Sasaran	Elemen SWOT
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan perangkat daerah	Kekuatan: 1. Dukungan regulasi tentang Transparansi Kinerja Pemda 2. Dukungan sistem e-Government berbasis SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) 3. Dukungan akses internet dan aplikasi internal untuk monitoring kegiatan Kelemahan: 1. Masih belum sinkronnya jadwal/agenda pelaksanaan proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang padat dan saling beririsan waktu pelaksanaannya dengan kegiatan lain 2. Kesenjangan kompetensi SDM dalam pengelolaan sistem evaluasi kinerja 3. Mekanisme evaluasi internal belum terstruktur dengan baik 4. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja 5. Keterbatasan data kinerja yang terfragmentasi antar-bidang Peluang: 1. Integrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2. Dukungan KemenPAN-RB untuk peningkatan akuntabilitas 3. Tren <i>open government</i> memungkinkan pelibatan masyarakat via platform digital Ancaman: 1. Perubahan Kebijakan dengan efisiensi anggaran yang mempengaruhi hasil kinerja 2. Keterbatasan alokasi dana untuk pengembangan sistem evaluasi 3. Budaya kerja yang kurang adaptif terhadap inovasi
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat	Kekuatan: 1. Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh SDM di Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap pelaksanaan pelayanan publik

No	Sasaran	Elemen SWOT
	daerah	2. Telah memiliki website dan akun media sosial 3. Dukungan APBD untuk program pemuda dan olahraga Kelemahan: 1. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM 2. Terbatasnya sarana dan prasarana 3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi Peluang: 1. Dukungan dari stakeholder dan OPD terkait terhadap pelaksanaan pelayanan publik Dinas Pemuda dan Olahraga 2. Perkembangan teknologi digital dan media sosial Ancaman: 1. Perubahan kebijakan seperti efisiensi anggaran
3	Meningkatnya pembangunan keolahragaan	Kekuatan: 1. Tersedia lapangan/fasilitas olahraga di berbagai kecamatan 2. Dukungan APBD untuk keolahragaan 3. Terselenggaranya even rutin olahraga dan peningkatan kapasitas pelatih 4. Kesadaran masyarakat dalam berolahraga cukup baik 5. Banyaknya komunitas atau kelompok olahraga di kalangan masyarakat 6. Dukungan APBD untuk program pengembangan olahraga Kelemahan: 1. Keterbatasan SDM, baik pelatih, fasilitator maupun tenaga medis olahraga 2. Minimnya fasilitasi bagi tenaga/SDM olahraga 3. Beberapa atlet harus sekolah di kabupaten/kota lain karena KKO terbatas 4. Fasilitas olahraga belum merata dan belum optimal pemeliharannya 5. Keterbatasan SDM pendamping komunitas atau kelompok olahraga 6. Minimnya fasilitasi bagi tenaga/SDM pendamping

No	Sasaran	Elemen SWOT
		7. Keterbatasan sarana dan prasarana komunitas atau kelompok olahraga Peluang: 1. Dukungan yang baik dari stakeholder keolahragaan 2. Terbentuknya Pengurus Tingkat Kabupaten pada 46 cabang olahraga dalam wadah Organisasi KONI 3. Hadirnya informasi berbasis digital berupa konten olahraga 4. Trend gaya hidup sehat dengan berolahraga 5. Dukungan yang baik dari stakeholder keolahragaan 6. Hadirnya informasi berbasis digital berupa konten olahraga Ancaman: 1. Perubahan kebijakan seperti efisiensi anggaran
4	Meningkatnya pembangunan kepemudaan	Kekuatan: 1. Jumlah usia muda (16-30 tahun) yang tinggi 2. Tingkat pendidikan usia muda yang tinggi 3. Literasi digital usia muda yang baik 4. Komitmen stakeholders bagi pengembangan kualitas pemuda 5. Banyaknya organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) 6. Banyaknya jumlah anggota pramuka 7. SDM berdedikasi pada organisasi pramuka 8. Tingginya minat/ animo pembina pramuka untuk mengikuti kursus kepramukaan 9. Ketersediaan anggaran penyelenggaraan kursus kepramukaan 10. Dukungan dari Kwarda Sleman dengan menyediakan Pelatih Pembina pramuka yang profesional 11. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan organisasi kepramukaan baik di Kwarda dan Kwaran

No	Sasaran	Elemen SWOT
		Kelemahan: 1. Hadirnya karakter generasi strawberry dan budaya instan 2. Berkurangnya pemahaman budaya lokal generasi muda 3. Rendahnya kemandirian dan daya saing pemuda 4. Belum optimalnya pengembangan kemandirian bagi pemuda 5. Minat dan motivasi berorganisasi bagi pemuda menurun 6. Keunggulan dan kemanfaatan OKP belum terlihat jelas 7. Regenerasi kepada pemuda masih kurang 8. Belum semua pembina mendapat kesempatan mengikuti Kursus Mahir Dasar yang bersumber dari APBD 9. Kurangnya dan belum meratanya sarana dan prasarana kepramukaan 10. Masih lemahnya kemandirian organisasi kepramukaan sehingga tergantung iuran anggota dan anggaran pemerintah Peluang: 1. Bonus demografi 2. Dukungan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan pemuda 3. Terjalannya koordinasi dan kolaborasi dengan dinas terkait dan praktisi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kualitas pemuda 4. Dukungan anggaran dan pembinaan untuk OKP 5. Adanya aturan sosial tidak mengikat di kalangan pemuda untuk bersosialisasi 6. Tersedianya program dan kegiatan pengembangan kepramukaan 7. Teknologi informasi berbasis digital dan media sosial dapat membantu upgrading dan transformasi motivasi mengikuti kegiatan pramuka Ancaman: 1. Konten negatif media digital 2. Perubahan kesehatan mental generasi muda

No	Sasaran	Elemen SWOT
		3. Perubahan kebijakan anggaran karena efisiensi 4. Pengaruh gadget menurunkan minat kepramukaan 5. Kurangnya dukungan orang tua <i>karena academic minded</i>